

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO *n*ext

Edisi 25
Januari 2021



**5 KALI
LEBIH
CEPAT**

MIRA TAYYIBA
SEKJEN KEMENKOMINFO RI

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Patricia Samantha S.
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmi Trihatin J.

5 Kali Lebih Cepat

Selamat Datang 2021. Selamat Tahun Baru bagi para pembaca Majalah KominfoNext. Mengawali semangat baru di tahun yang baru, dengan bangga Tim Redaksi KominfoNext menyapa para pembaca sekalian dengan mengutip *quote* menarik dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba, saat membuka acara Menkominfo Menyapa pada tanggal 4 Januari 2021 lalu, yang dihadiri para Pimpinan Kominfo secara fisik, dan dihadiri 1.500 sivitas Kominfo secara virtual.

Sekjen Kominfo optimis ASN Kementerian Kominfo mempunyai energi baru dan semangat baru mengawali 2021 dengan konsisten menjalankan berbagai agenda kerja, terkhusus menyoal transformasi digital dan komunikasi publik. Terlebih lagi, tahun 2021, Kementerian Kominfo diberi kepercayaan menyukseskan berbagai program prioritas dengan dukungan anggaran lima kali lebih besar dari anggaran awal tahun 2020. "Artinya, kita harus siap berlari lima kali lebih kencang, membidik target lima kali lebih tepat, dan bekerja bersama lima kali lebih kompak". Demikian sambutan hangat Sekjen Kominfo Mira Tayyiba.

Dengan dukungan anggaran belanja negara lima kali lebih besar, salah satu tantangan yang perlu disikapi adalah tahap pemulihan ekonomi, selain fokus pada agenda pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memang bukanlah tugas yang sederhana. Tapi sekali lagi, berbekal energi dan semangat baru, Sekjen Mira Tayyiba secara tegas mengatakan ASN Kominfo siap menjalankan tugas di bawah arahan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate untuk menjadikan Indonesia Terkoneksi.

Kita telah melewati sepanjang tahun 2020 dengan perjuangan yang tidak mudah. Membatasi jarak antar-manusia dengan cara tidak berkerumun guna menghindari kontak fisik, menjadi suatu tantangan tersendiri. Tidak mudah, memang. Tapi inilah keadaan darurat dampak dari bencana non alam pandemi COVID-19.

Pada akhirnya, hampir semua manusia akan mengenang angka keramat 'dua puluh dua puluh' itu saat pandemi ini berakhir nanti.

Indonesia harus bangkit. Bijaki pandemi dengan membajak momentum di era baru: Era Transformasi Digital. Demikian arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengatkan kita agar pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital.

Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate kemudian mengarahkan seluruh ekosistem Kementerian Kominfo dan mitra kerja, menjawab arahan dan kebijakan Presiden melalui Empat Pilar Akselerasi Transformasi Digital: 1). Pembangunan infrastruktur digital secara masif, 2). Pengembangan teknologi, 3). Penguatan talenta digital melalui pelatihan dari tingkat *basic* hingga *advance*, dan 4). Regulasi dan kerjasama internasional.

Kepada para pembaca Majalah KominfoNext, Menteri Johnny G. Plate bersama seluruh keluarga besar Kementerian Kominfo dengan bangga mempersembahkan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju, akan menjadi motto yang luar biasa untuk menghantar Indonesia memasuki era digital dan mewujudkan Indonesia sebagai Bangsa Digital.

"Kerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk kita capai satu tujuan yaitu; Sukses, Sukses dan Sukseskan Transformasi Digital Indonesia."

Menteri Kominfo Johnny G. Plate

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Pimpinan Redaksi KominfoNext

 @FSetu
  @FSetu
  FSetu TV



Daftar

Isi

2

Surat dari
MMB 9

4

Teknologi &
Gadget

10

KominfoPedia

12

Menkominfo
Bicara

20

Liputan
Utama

32

ASN Muda

36

Kamus
Transformasi
Digital

40

Kabar Istana

52

Miss Lambe Hoaks
VS Fact Boy

54

Kabar
COVID-19

56

Liputan
Khusus

74

Foto
Esai

82

BAKTI Untuk
Negeri

86

KominfoTalk

90

KomEvent

110

Layanan
Kominfo

116

Top 10
Hoaks
Populer



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30

Rak Buku



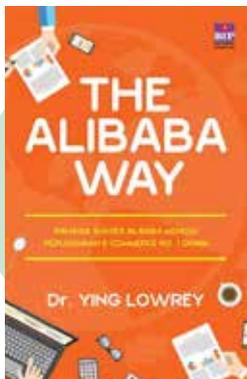
Penulis :
Scott Stratton

Unbranding

100 Pelajaran Branding di Era Disruptif

Buku ini berisi tentang 100 kisah pemasaran yang akan menantang asumsi kita tentang cara berbisnis saat ini, dan mengajarkan nilai-nilai dan pelajaran yang bisa dipraktikkan dalam dunia bisnis. Beberapa topik yang dibahas adalah menumbuhkan dan mengelola identitas produk di tengah riuhnya informasi, menjaga kepercayaan, konsistensi, dan koneksi melalui layanan konsumen, serta cara yang tepat untuk menavigasi *feedback* dan *review*.

Rak Buku



Penulis :
Ying Lowrey

The Alibaba Way

Rahasia Sukses Alibaba Menuju
e-Commerce No. 1 Dunia

Inilah kisah sukses *e-commerce* yang paling luar biasa, suatu model pertumbuhan dahsyat bagi setiap perusahaan *start-up* dan pengusaha pemula. Sebagai perusahaan *e-commerce* raksasa dalam lingkup daring, Alibaba Group memfasilitasi para pengusaha kecil serta mendorong keberhasilan mereka dalam skala nasional. Kiat-kiat sukses ini tercatat dalam *The Alibaba Way*.

Melalui buku ini Anda dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, berinovasi dalam bisnis, memanfaatkan teknologi sebagai strategi perusahaan, memenuhi kebutuhan konsumen, serta meningkatkan produktivitas hingga ke tingkat internasional.

Rak Buku



Penulis :
Aryanto Yuniawan

Battle of Surabaya

Novel sejarah dengan latar belakang situasi zaman kemerdekaan yang menggambarkan perjuangan pemuda Surabaya menjelang peristiwa 10 November yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berikut cuplikan sinopsisnya:

Rakyat Surabaya semakin resah. Kedatangan tentara Sekutu yang menggantikan Jepang rupanya tidak membawa perubahan. Setiap hari, Musa, si bocah penyemir sepatu, menyaksikan perjuangan rakyat Surabaya. Perang telah membuatnya harus kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Bersama Yumna sahabatnya, Musa bergabung dengan laskar rakyat untuk memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan.



Oleh: Meilawati

Pustakawan Muda Kemkominfo

Tahukah Anda jika perpustakaan bisa menghilangkan rasa jenuh di tengah penatnya tumpukan pekerjaan? Pabrik inspirasi dan sumber informasi.

Seperti yang kita ketahui, pengetahuan yang luas dapat meningkatkan kualitas hidup. Cara termudah untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan membaca. Sayangnya, saat ini tingkat literasi di Indonesia memang memprihatinkan.

Data dari UNESCO menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia adalah 0,001 yang artinya dari 1000 orang Indonesia, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Terlebih dengan adanya alternatif hiburan melalui digital yang lebih menarik perhatian. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak juga yang lebih nyaman membaca publikasi tercetak.

Kegiatan membaca tidak selalu identik dengan kutu buku, lorong-lorong panjang dengan rak-rak besar, atau kertas-kertas yang mulai menguning. Era digital saat ini telah menghadirkan beragam inovasi baru, salah satunya kehadiran perpustakaan digital.

Perpustakaan digital adalah perpustakaan berbentuk *electronic library* yang memiliki koleksi buku dalam bentuk elektronik atau biasa disebut *e-book*. Perpustakaan digital dapat diakses di komputer atau pun gawai lainnya kapan pun dan di mana

pun, sehingga kita tidak perlu keluar rumah dan bisa mendapatkan informasi atau pun pengetahuan secara mudah. Artinya, *Work From Home* atau pun *School From Home* tidak menjadi alasan untuk tidak membaca.

Nah, tahukah Anda bahwa Perpustakaan Kementerian Kominfo juga akan segera menghadirkan layanan digital melalui aplikasi e-Perpus Kominfo? Atau Anda termasuk yang belum pernah berkunjung ke Perpustakaan Kominfo, terlebih setelah banyak pegawai yang menerapkan sistem kerja *Work From Home* (WFH)?

Perpustakaan Kominfo berjalan beriringan dengan percepatan proses transformasi digital yang digaungkan Kementerian Kominfo. Layanan perpustakaan digital ini menyediakan beragam buku elektronik. Tidak perlu lagi khawatir untuk berkunjung secara fisik atau pun memegang koleksi secara langsung.

Kehadiran e-Perpus Kementerian Komunikasi dan Informatika, nantinya akan mempermudah sivitas Kominfo untuk memperoleh informasi dan dokumentasi baik terkait Kominfo atau bacaan ringan sebagai teman perjalanan pulang di TransJakarta ataupun kereta. Seluruh koleksi *e-book* Perpustakaan Kominfo bisa kapan pun menemani pemustaka.

Jadi, ditunggu yaa e-Perpus Kominfo, segera.....

TEKNO LOGI & GAD GET



Mengenal Kotak Hitam Pesawat Terbang

Indonesia kembali berduka dengan jatuhnya pesawat milik Sriwijaya Air SJ182 pada 9 Januari 2021 di Kepulauan Seribu. Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Basarnas hingga seluruh elemen organisasi masyarakat turut bahu-membahu melakukan penyelamatan.

Selain mencari dan menyelamatkan korban jiwa yang memang menjadi prioritas utama, pencarian difokuskan juga untuk bisa mencari bagian dari pesawat tersebut yang lazim disebut sebagai *black box*. Lalu apakah sebenarnya *black box* itu?

Black box atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti kotak hitam, tidak sepenuhnya berwarna hitam serta berbentuk kotak seperti nama yang disematkan padanya. Benda ini berwujud kotak dengan beberapa bagian silinder, serta berwarna merah menyala. Warna merah menyala dari benda ini maksudnya agar mudah dilihat dan ditemukan karena warnanya yang memang *eyecatching*. Lantas kenapa benda ini menjadi bagian pesawat yang paling dicari ketika terjadi kecelakaan pesawat?

Sumber Foto :

Unsplash



Sumber Foto : <https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2020/01/10/fe5a6f21-04f6-418a-b1ca-c22cd8702de2.jpeg?w=700&q=90>

Hal ini dikarenakan fungsi dari *black box* ini sendiri yaitu sebagai perangkat yang merekam data selama penerbangan. Dari data yang direkam pada *black box* ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atau pihak berwenang lainnya dapat melakukan analisa terkait apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, untuk kemudian dipelajari dan dicarikan solusinya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.

Black box terdiri dari *Cockpit Voice Recorder* (CVR) dan *Flight Data Recorder* (FDR) serta suar yang bisa mengirimkan sinyal selama 30 hari. Sejarah penemuan *black box* sendiri cukup panjang, dimulai ketika Wright Brothers memasang perangkat untuk mencatat parameter seperti putaran baling-baling dan kecepatan udara pada tahun 1903. Kemudian pada tahun 1953, David Warren ahli kimia Australia dari *Aeronautical Research Laboratories* (ARL) dan rekan-rekannya berhasil membuat CVR pertama dan disusul JJ Ryan yang mematenkan alat untuk merekam ketinggian, data kecepatan

serta akselerasi *vertical*. Pada tahun 1960, FDR dan VCR yang dikemas menjadi satu sebagai *black box* menjadi perangkat yang wajib ada dalam sebuah pesawat.

Dalam pembuatannya, *black box* menjalani serangkaian *testing* mulai dari tes untuk menahan benturan hingga 3.400G, benturan statis selama 5 menit untuk ditekan dengan gaya 226 kg per inci, dipanaskan hingga 1.100 derajat celcius selama 1 jam, direndam di tangki air asin bertekanan selama 24 jam, ditempatkan di tangki air asin selama 30 hari dan berbagai cairan seperti bahan bakar jet, pelumas dan bahan kimia pemadam kebakaran hingga dijatuhkan beban 227 kg dengan pin baja 5 mm dari ketinggian 3 meter. Jika unit *black box* berhasil melewati tes ini, maka unit siap untuk *di-install* ke dalam pesawat untuk melakukan tugas-tugasnya. Harga sebuah *black box* dibanderol antara US\$ 10 ribu – US\$ 15 ribu.

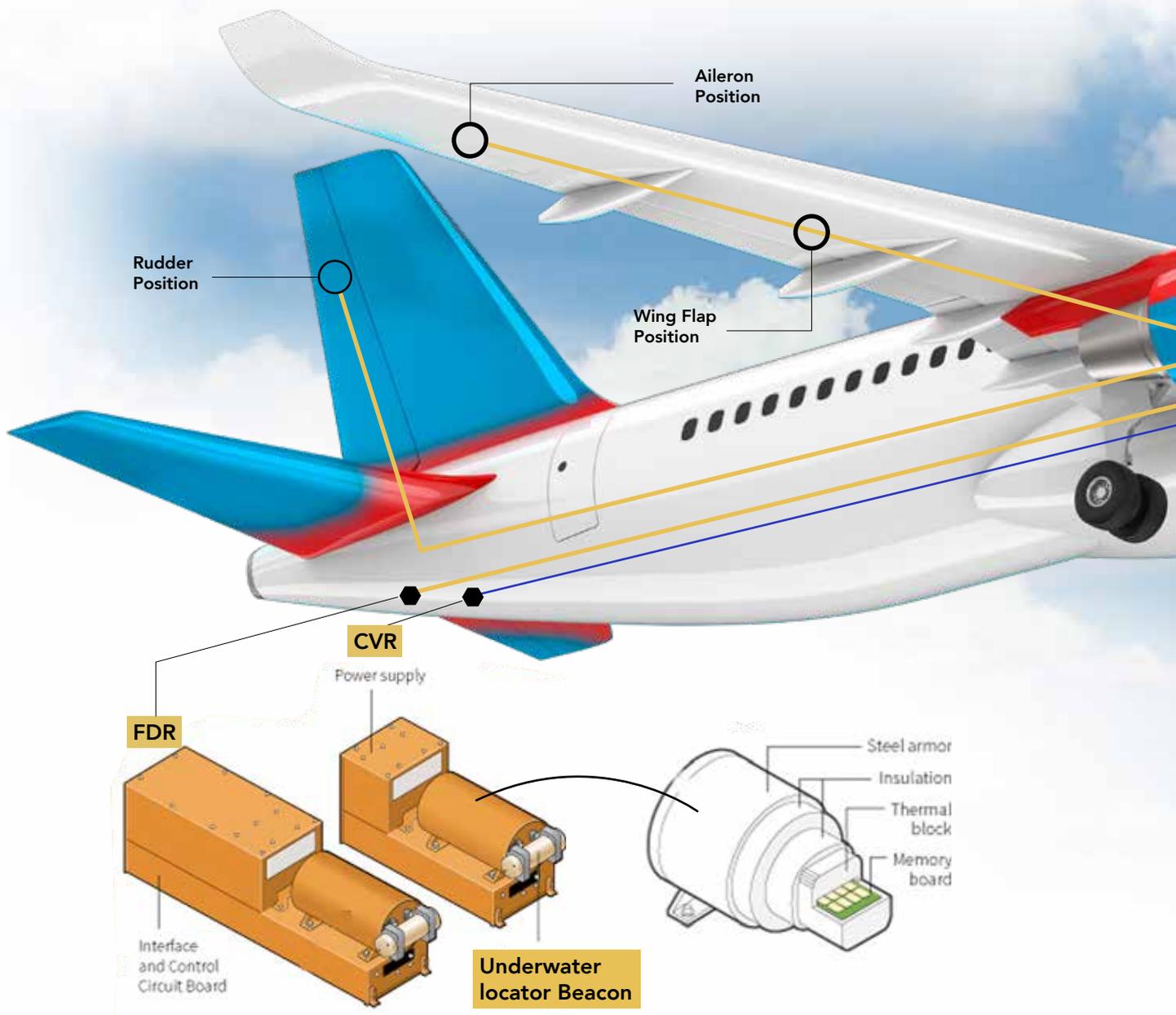
Berikut kita bahas bagian per bagian yang terdapat pada **Black Box**

Flight Data Recorder (FDR)

FDR memiliki tugas untuk mencatat parameter-parameter teknis penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, putaran mesin, radar, auto pilot dan parameter teknis lainnya. Parameter teknis yang dicatat oleh FDR mencapai 300 parameter yang direkam selama 25 hingga 30 jam.

Underwater Locator Beacon (ULB)

ULB memiliki peran penting agar perangkat *black box* mudah ditemukan, khususnya ketika jatuh di laut. ULB merupakan transmiter yang akan memancarkan gelombang akustik sehingga mudah dideteksi keberadaannya.



Cockpit Voice Recorder (CVR)

CVR bertugas merekam percakapan pilot di dalam kokpit. Menurut analis dan investigator *black box* Nugroho Budi yang dilansir pada laman detik.com, pada CVR terdapat 4 saluran yaitu :

- **Saluran 1** terhubung dengan pengeras suara yang biasa digunakan pramugari kepada penumpang
- **Saluran 2** terhubung dengan kopilot
- **Saluran 3** terhubung dengan pilot ke *Air Traffic Control* (ATC)
- **Saluran 4** merekam suasana kokpit, suara instrumen-instrumen di kokpit, suara mesin, hujan dll

Secara singkat, CVR merupakan alat perekam audio di pesawat. Menurut Kasubbag Pelayanan Investigasi dan Penelitian KNKT, Moch Haryoko, durasi perekaman untuk CVR yaitu 30 menit. Setiap 30 menit, rekaman akan diganti dengan yang baru secara otomatis.



Perangkat *black box* baik CVR dan FDR akan **hidup secara otomatis ketika pesawat dihidupkan**. Lokasi perangkat ini berada di bagian ekor, dengan pertimbangan bahwa bagian ekor pesawat merupakan bagian yang paling sedikit terkena *impact* ketika kecelakaan pesawat terjadi. Hadirnya *black box* pada pesawat terbang, dapat membuka kotak hitam misteri suatu kejadian atau musibah yang menimpa pesawat, untuk kemudian dipelajari dan menjadi evaluasi kedepannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sumber

<https://news.detik.com/berita/d-1919012/ini-beda-fungsi-cvr-dan-fdr-pada-black-box-pesawat>

https://cdn.medcom.id/dynamic/photos/2021/01/17/47886/Mengenal_Sejarah_dan_Teknologi_Black_Box_Pesawat_2.jpg?w=1111

Honeywell;BEA (bureau d'Enquetes et d'Analyses), Boeing

Digital Right Management

Oleh: Agung Windhi Prasetya

Pustakawan Muda Kemkominfo

Siapa SobatKom yang suka main game? Pernahkah terpikirkan, kok bisa para *publisher* atau penerbit video game memberikan akses ke kita untuk mengunduh produknya tanpa takut akan disebarluaskan secara ilegal? Buat yang penasaran, yuk kita simak artikel ini sampai akhir.

Para *publisher digital* ini menerapkan Digital Right Management (DRM), suatu teknologi sistematis yang digunakan untuk melindungi karya intelektual berbentuk digital, seperti game, musik, video, film, perangkat lunak, dan sebagainya. DRM memungkinkan pendistribusian informasi berharga secara digital tanpa melanggar HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), dan memungkinkan *publisher* untuk membatasi sirkulasi produknya agar tidak disebarluaskan secara ilegal.

Sistem DRM dirancang untuk melindungi informasi secara persisten sesuai dengan aturan komersial produk yang dilindungi tersebut. Cara kerjanya dengan memberi batasan akses tertentu pada pengguna atas pemakaian produk digital tersebut dengan tujuan memberantas pembajakan.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yang pertama adalah **Verifikasi**. Metode verifikasi ini memiliki beberapa cara, salah satunya menggunakan *product key*. Kalau SobatKom pernah memasang (*install*) sistem operasi Windows di komputer, ketika pertama kali dipasang biasanya diminta untuk memasukkan kode berupa huruf, angka, atau kombinasi keduanya kan? Nah, itu yang disebut dengan *product key*.



Aplikasi, baik game ataupun perangkat lunak, memerlukan kode ini saat pertama kali dipasang di komputer, atau ketika masa percobaan (*trial*) sudah habis. Perangkat lunak tidak akan dapat dijalankan atau dipasang di komputer jika penggunanya tidak memiliki kode atau kunci yang tepat.

Cara kedua dari metode verifikasi adalah otentikasi online terus menerus. Artinya, secara aktif perangkat lunak terus menerus terhubung ke server otentikasi, menyatakan bahwa perangkat lunak yang digunakan sesuai dengan data pembelinya. Jika kunci aplikasi sedang digunakan oleh satu pengguna, maka aplikasi tersebut tidak akan bisa digunakan oleh yang lain. Jadi, jika ada 2 pengguna yang akan memakai aplikasi tersebut, solusinya adalah membeli 1 lagi.

Metode DRM yang kedua adalah **Copying Restriction** yang biasanya digunakan di dokumen elektronik dan *e-book*. Cara kerjanya yaitu setiap material yang dilindungi DRM dimasukkan ke dalam "kotak" yang terkunci menggunakan enkripsi. Setiap pengguna, pengunjung, atau pelanggan yang sudah berlangganan, ataupun membeli, menyewa, bahkan meminjam material tersebut, diberikan kunci digital untuk mengakses kotak itu.

Jadi ketika kita mau mengakses 'kotak'nya, gawai yang kita gunakan akan mengecek, apakah kita punya hak untuk akses "kotak" itu? Jika berhak, maka gawai akan membuka kuncinya, lalu materialnya dikeluarkan dari dalam "kotak" tersebut, baru kemudian kita membaca, menonton, atau mengakses kontennya.

Ada 4 skema copying restriction pada DRM yang banyak digunakan, yaitu Adobe DRM yang digunakan untuk mengenkripsi EPUB dan PDF, DRM Amazon yang merupakan adopsi dari Mobipocket, DRM Apple FairPlay, dan Marlin DRM yang didirikan oleh 5 perusahaan besar yaitu Intertrust, Panasonic, Philips, Samsung, dan Sony.

Metode ini juga diterapkan dalam koleksi *e-book* di perpustakaan, termasuk perpustakaan Kominfo loh. Dengan DRM, penerbit dapat memberikan akses ke perpustakaan untuk dapat meminjamkan *e-book* atau buku digital dalam jumlah tertentu dengan pembaca yang terbatas. Jadi, pengunjung perpustakaan bisa menikmati bacaan digital koleksi perpustakaan dari mana saja, tanpa melanggar hak cipta, dan buku tetap terlindungi sehingga tidak bisa di-copy dan disebarluaskan. Jadi, ditunggu ya Sobatkom rilis resmi aplikasi *e-perpustakaan* nanti.

Sumber : informatika.stei.itb.ac.id, britannica.com, akun Youtube Intertrust Technologies "What is DRM and how does it work?"

Kerja Kolaboratif, Reformatif dan Transformatif Wujudkan Akselerasi Transformasi Digital

Kejadian luar biasa Pandemi COVID-19 telah mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika serta elemen bangsa lainnya untuk terus beradaptasi dan bergerak maju.

“Besok 31 Desember 2020 kita akan meninggalkan segera tahun 2020 dan menjemput tahun 2021 yang kita doakan membawa harapan baru bagi masyarakat dan bangsa kita,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Virtual Implementasi Akselerasi Transformasi Digital dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial ketika semua elemen bangsa terus menghadapi COVID-19. “Setiap tahun tentu memiliki pembelajaran dan keistimewaannya tersendiri, namun tahun 2020 dapat dikatakan adalah tahun yang spesial. Pandemi membuat semua terus beradaptasi dan bergerak maju kiati COVID-19,” ungkapny.

Pada tahun depan, Menteri Johnny optimistis dengan kerja kolaboratif akan mewujudkan Indonesia terkoneksi. **“Dengan kerja kolaboratif, reformatif, dan transformatif tentunya, mari kita songsong Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju!”** tandasnya.

Lebih Cepat 10 Tahun

Menteri Kominfo merinci beberapa hasil kerja keras dan kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika. “Yang telah dilakukan, tahun 2020 ini Kementerian Kominfo melaksanakan lima hal,” paparnya.

Pertama, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo meneruskan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil *digital divide*.

Menurut Menteri Kominfo, upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa dan kelurahan. “Seperti kita semua sudah kita ketahui yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016,” jelasnya.

Kaleidoskop 2020 & Outlook 2021

Implementasi Akselerasi Transformasi Digital oleh Kementerian Kominfo



1 Meneruskan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil *digital divide*.

2 Secara intensif terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital.

3 Penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif melalui penerbitan beberapa regulasi kunci.

4 Mendukung penciptaan ruang digital Indonesia yang aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital termutakhir.

5 Terus memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di forum antarnegara

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika

30 Desember 2020

Menurut Menteri Johnny, proyek itu direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan. "Atau pada akhir tahun 2022 kita harapkan selesai dan itu lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032 apabila dilakukan secara biasa-biasa saja," tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membangun seluruhnya 9.113 BTS di desa dan kelurahan di daerah 3T. "Sedangkan 3.435 sisanya berada di daerah non-3T dan menjadi wilayah kerja dan komitmen dari seluruh operator seluler," ungkapnya.

Selain pembangunan BTS, Kementerian Kominfo juga telah membangun layanan akses internet di 4.400 titik layanan fasilitas publik. "Di mana 3.126 titik diantaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan atau fasyankes," tutur Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo melakukan percepatan untuk menyelesaikan penyediaan konektivitas untuk mendukung kegiatan fasyankes pada tahun 2020, lebih cepat dari rencana awal penyelesaian di tahun 2027 "Atau 7 tahun lebih awal, sehingga seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia sejumlah 13.011 termasuk di daerah 3T di akhir tahun ini telah memiliki akses internet," tandas Menteri Kominfo.

Literasi dan Ekosistem Digital

Hal **kedua**, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo secara intensif terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital.

"Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi telah memberikan pelatihan kecakapan digital level dasar. GNLD Siberkreasi tahun ini berhasil menjadi *Winner World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020* dari PBB," jelasnya.

Sementara, untuk meningkatkan kecakapan digital menengah, Kementerian Kominfo memberikan stimulus pelatihan Digital Talent Scholarship. "DTS

Sampai tahun 2020,
BTS sudah dibangun
sebanyak **1.679** lokasi
Terdiri dari **25** Provinsi, **143**
Kabupaten dan **1.672**
desa/kelurahan **1677** sudah
berteknologi **2G/4G**
Tahun 2021-2022 akan
dibangun **7.904** lokasi BTS

telah memberikan pelatihan untuk sekitar 58.000 peserta, di mana di 34.333 di antaranya telah tersertifikasi nasional dan global. Dan masih akan bertambah lagi," jelas Menteri Kominfo.

Ketiga, dalam penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif, Kementerian Kominfo menerbitkan beberapa regulasi kunci. "Tahun 2020 ini, terdapat beberapa regulasi di sektor informatika dan komunikasi yang telah disahkan," ungkap Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar). Menurutnya, UU Cipta Kerja mengatur tentang kerja sama akses infrastruktur yang dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital Indonesia.

"Ketentuan tersebut juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk digitalisasi penyiaran dengan memberikan penetapan tenggat waktu migrasi pada November 2022, kurang dari dua tahun lagi," jelasnya.



Menurut Menteri Johnny hal itu menjadi langkah besar karena digitalisasi penyiaran dapat meningkatkan kualitas siaran agar lebih jernih, serta memberikan *dividen digital* sekitar 112 MHz.

“Yang dapat digunakan untuk optimalisasi sinyal 4G di daerah 3T dan implementasi teknologi 5G. Di samping itu juga diatur dalam undang-undang ini yang terkait dengan *spectrum sharing*, peningkatan usaha perposan dan digitalisasi penyiaran,” paparnya.

Menteri Kominfo meyakini upaya tersebut akan dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mengutip kajian tahun 2017 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Menteri Johnny menyatakan hingga tahun 2026 nanti, digitalisasi penyiaran diproyeksikan mendorong 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru.

“Akan ada 232 ribu penambahan lapangan kerja baru, dan penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 77 triliun. Digitalisasi penyiaran juga berpotensi memberikan kontribusi pada PDB nasional hingga mencapai Rp 443,8 triliun,” jelasnya.

Dalam mendukung ekosistem digital, Menteri Johnny telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz.

“Secara spesifik, Permen ini mendorong tercapainya sasaran penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *broadband* sebesar 30 MHz pada 2020,” jelasnya.

Selain itu terdapat Permen No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pendaftaran, pengawasan, dan pengendalian PSE privat demi mewujudkan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

“Selain regulasi-regulasi tersebut, Kementerian Kominfo juga mengharapkan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Saat ini, RUU tersebut sedang diproses atau berproses politik bersama DPR dan semoga dapat disahkan di awal tahun 2021. Mengingat pentingnya Indonesia untuk segera memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi,” jelas Menteri Kominfo.

Ruang Digital dan Teknologi Mutakhir

Upaya Kementerian Kominfo **keempat**, menurut Menteri Johnny dengan mendukung penciptaan ruang digital Indonesia yang aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital termutakhir.

“Melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo pada tahun 2020 telah menangani 119.847 laman *website* dan 168.406 unggahan media sosial yang memuat konten negatif atau yang melanggar undang-undang,” paparnya.

Di tahun 2021, Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring konten digital di internet untuk menjaga agar ruang siber yang kondusif. “Sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang tadi disebutkan,” jelas Menteri Kominfo.

Menurut Menteri Johnny, konten terlarang tersebut termasuk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang meresahkan masyarakat. “Seperti terorisme, radikalisme, pornografi anak, baik substansi konten, maupun ajakan, dan fasilitasi penyebaran konten yang dilarang, yang memecah atau berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan dan keutuhan negara,” rincinya.

Menteri Kominfo menyatakan upaya untuk menjamin efektivitas dan keamanan infrastruktur ruang digital di Indonesia akan semakin ditunjang oleh rencana pembangunan Pusat Data Nasional. “(Pembangunan) PDN di dua lokasi di Indonesia dengan kapasitas total prosesor 43.000 *cores* dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 Petabytes,” ungkapnya.

Sumber Foto : Unsplash.com

Prinsip Indonesia Dalam Memperkuat Posisi di Forum Antar Negara

Dalam hal isu **cross-border data flow** pada prinsip kedaulatan serta keamanan data

Principle Of Lawfulness

Fairness

Transparency

Principle of Reciprocity

Perkuat Peran Internasional

Upaya **kelima** yang dilakukan Kementerian Kominfo untuk mewujudkan transformasi digital dengan terus memperkuat posisi serta prinsip Indonesia di forum antarnegara atau internasional.

“Baik forum bilateral, regional dan multilateral, serta dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk *World Economic Forum (WEF)*, *G20*, *International Telecommunication Union (ITU)*, *ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN)* dan *platform* lain di bawah payung ASEAN, seperti fora ASEAN-China,” papar Menteri Johnny.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Menteri Kominfo menyatakan terus menekankan keteguhan Indonesia terhadap isu *cross-border data flow* dengan mengacu pada prinsip-prinsip *principle of lawfulness, fairness, transparency, dan principle of reciprocity*. “Yang terpenting, prinsip kedaulatan serta keamanan data, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Sumber Foto : Unsplash.com



Kemanfaatan

Menteri Johnny menegaskan tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia adalah agar manfaat besar dari perkembangan sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM/Ultra Mikro dan startup digital yang lebih banyak, serta ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” tandasnya.

Menteri Kominfo menyatakan tahun 2021 juga akan ditandai dengan persiapan *deployment 5G technology* di Indonesia. “Mengawali di beberapa spot pariwisata utama, kawasan industri, ataupun kota-kota mandiri dari sisi ekosistem yang dinilai telah siap dengan 5G,” ungkapnya.

Namun di saat yang sama, Menteri Kominfo menegaskan optimalisasi dan maksimalisasi *deployment 4G* terus dilakukan untuk meningkatkan *internet link ratio* dan memperkecil disparitas digital atau *digital divide* antarwilayah di Indonesia.



“Karenanya, pada kesempatan saat ini juga, dengan hormat saya tentu berharap dan mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu agar di tahun 2021 kita bersama menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dalam merespons dinamika yang terus terjadi,” harapnya.

Dalam konferensi pers virtual itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Teyyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen PPI Ahmad M Ramli; Dirjen Aptika

Semuel A Pangerapan; Dirjen IKP Widodo Muktiyo; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto dan Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

Hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Henri Subiakto, serta Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi, Phillip Gobang, Zulfan Lindan dan Rosarita Niken Widiastuti.

Mengenal Lebih Dekat

Sosok Sekretaris Jenderal Kominfo



Mira Tayyiba resmi mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo pada tanggal 23 Desember 2020. Ia dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate untuk menggantikan Sekjen Kominfo periode sebelumnya, Rosarita Niken Widiastuti yang telah memasuki masa purnabakti.

Sebelum resmi bergabung di Kementerian Kominfo, Sekjen Mira terbilang cukup dekat dengan dunia teknologi dan informatika. Ia pernah terlibat dalam penyusunan Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.

Mira juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Manajemen Pelaksana *e-commerce* dan Anggota Tim Pelaksana, sesuai Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap e-commerce*)

2017-2019, sekaligus sebagai *focal point* Indonesia terkait pengembangan *e-commerce* di ASEAN (2017-2019).

Sejak 2014 hingga saat ini, Sekjen Mira juga bergabung dalam Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagai Wakil Sekretaris II Tim Pelaksana.

Sederet pengalamannya di bidang kominfo didorong oleh ketertarikannya akan dunia teknologi sejak kecil. Di masa kecilnya, Sekjen Mira mengagumi kemajuan teknologi saat itu, ketika televisi bisa mengudara melalui satelit yang dikenal dengan Satelit SKSD PALAPA.

"Saya tumbuh besar itu disodori dengan kemajuan teknologi pesawat, ada dulu namanya Satelit SKSD (Palapa). Jadi waktu saya kecil, setiap Jumat sore jam 4.30 itu ada cerdas cermat, saya suka banget sama acara itu. Menurut saya Satelit SKSD dari Stasiun Domestik Jatiluhur dan segala macamnya itu sangat menakjubkan.



Artinya, kita harus siap berlari lima kali lebih kencang, membidik target lima kali lebih tepat, dan bekerja bersama lima kali lebih kompak

- Mira Tayyiba



Suatu benda segitu besarnya, bisa dibawa ke angkasa dan mengorbit. Karena dia mengorbit, kita semua bisa nonton TV. *Se-simple* itu sebetulnya awal ketertarikan saya di teknologi,” tutur Sekjen Mira.

Ketertarikannya akan teknologi membuatnya mengambil program studi telekomunikasi saat menjalani pendidikan S1. Sekjen Mira mengambil jurusan Teknik Elektro di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1996. “Sepanjang sekolah, ternyata ketertarikan saya memang ke arah pendidikan elektro jurusan program studi telekomunikasi. Buat saya, secara insting melihat ini pasti teknologinya akan berkembang, karena kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sampai kapanpun tidak akan hilang,” ungkap Sekjen Mira.

Ia kemudian mendapatkan beasiswa dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan menyelesaikan studi S2 dengan gelar Master of Science in Electrical Engineering dari Northeastern University Boston USA di tahun 1998.



Usai lulus S2, ketertarikannya di sektor teknologi juga membuatnya berkeinginan untuk bekerja di operator telekomunikasi. “Sebetulnya saya tidak terbayang bahwa saya akan duduk di sini seperti saat ini, tapi saya sudah mencita-citakan ingin bekerja apapun itu, apakah sebagai operator, apakah sebagai regulator di sektor ini. Pada waktu saya masuk, isu telekomunikasi sedang seru-serunya. Tahun 1999 itu kita mengeluarkan cetak biru telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi, suatu reformasi besar-besaran di sektor infrastruktur TIK. Tanpa disadari saya terus mengikuti, dan karena telekomunikasi teknologi juga berkembang, industrinya berkembang, jadi semakin seru gitu rasanya. Bagaimana digital itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang sekarang sering kita lihat untuk pendidikan, kesehatan, sektor ekonomi lainnya,” ujar Mira saat diwawancarai di ruangannya.



“Sumber dayanya juga harus memiliki *mindset* yang terbuka. Belum tentu bisa memahami teknologinya tapi bisa memahami potensi pemanfaatannya sekaligus risikonya. Jadi, bisa *mem-balance*. Kemudian ada agenda perencanaannya, karena

kalau Kominfo dituntut untuk bergerak cepat melaksanakan transformasi digital, bensinnya harus kuat,” ujar Mira.

Dua Agenda Utama Dukung Transformasi Digital

Menduduki jabatan Sekretaris Jenderal, Mira melihat ada dua kelompok agenda di Kominfo untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah agenda keluar Kominfo, sesuai dengan arahan Menteri Kominfo, sebagai sarana koordinator atau muara yang mengkoordinasikan antara Kominfo dengan kementerian/ lembaga lainnya.

“Transformasi diciptakan bukan hanya di Kominfo, tapi di banyak sektor strategis lainnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari transformasi digital dan apa yang Kominfo bisa berkontribusi untuk bertransformasi menjadi salah satu isunya,” jelas Mira.

Sementara agenda ke dalam Kominfo, sebagai kementerian yang secara spesifik ditugaskan untuk menangani isu digital, maka instrumen pendukung pun juga harus memiliki kapasitas ke arah sana.

Mira mengibaratkan bensin itu adalah sumber daya dan anggaran. “Kita sudah punya perencanaan sampai 5 (lima) tahun, tetapi menjaga bagaimana rencana itu dilaksanakan dan bagaimana mendapatkan bensin tambahan, itu yang menjadi salah satu isunya juga.”

Isu lainnya yang harus diperhatikan adalah data, contohnya digital dalam sektor perdagangan. “Kita melihat ternyata *e-commerce* itu walaupun diadopsi di seluruh Indonesia tetapi yang paling banyak adalah di wilayah barat, utamanya di Jawa dan di Sumatera. Sebagai instrumen pendukung, utamanya adalah infrastruktur digital, karena bicara kegiatan digital pasti yang pertama harus ada infrastrukturnya, agar kita bisa lebih menasar target secara lebih efektif,” jelas Mira.



SELAMAT MENJALANKAN TUGAS

IBU SEKJEN MIRA TAYYIBA

SEMOGA MIMPI MEMBANGUN RUMAH SAKIT DAN MELUNCURKAN SATELIT DAPAT TERLAKSANA

Budaya Kerja Borderless

Sebagai Sekjen, Mira juga mengetengahkan agenda tentang penanggulangan COVID-19 di lingkungan Kominfo. Menurutnya ini menjadi agenda utama di kesetjanaan, bagaimana agar menyediakan sarana prasarana fasilitas yang memungkinkan semua pegawai bekerja secara aman dan juga nyaman namun dengan target yang sudah ditetapkan dapat terukur dan tercapai.

Dalam wawancara siang itu, Sekjen Mira juga membahas tantangan untuk membuka sekat antar satuan kerja Kominfo, dengan latar belakang masing-masing satker yang berbeda-beda. "Saya melihat latar belakang setiap Direktorat Jenderal beda-beda, SDPPI dan PPI dari postel, Aptika itu betul lahir yang mengurus soal konten internet dan aplikasi, IKP berkaitan dengan diseminasi "turunan dari penerangan yang dulu", walaupun sekarang sudah jauh berbeda. Jadi, masing-masing Ditjen ini memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, budaya kerja yang berbeda, jadi ini harus diseragamkan demi *rebranding* Kominfo," tuturnya.

Meski bukan hal yang mudah, Mira meyakini jika budaya kerja tanpa sekat ini akan menjadi hal positif bagi Kominfo. "Digital itu secara *nature* sifatnya *fluid*. Jadi digital itu *borderless*, membuka sekat antarkementerian, apalagi di lingkup internal Kominfo. Bagi saya ini adalah satu hal yang menarik, dan saya yakin ini menjadi suatu hal yang positif jika tidak ada sekat di internal Kominfo."



Karir dan Penghargaan

Sebelum resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, sekjen Mira memiliki jam terbang tinggi di berbagai bidang. Ia pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan SDM Kemenko Bidang Perekonomian sejak tahun 2020, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko Bidang Perekonomian (2019-2020); Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019); dan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2015-2017).

Selanjutnya ia pernah menjabat Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode 2017-2019; serta Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2015-2017. Beliau juga pernah bertugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) sebagai Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika (2006-2015).

Beberapa pelatihan yang pernah diikuti Sekjen Mira antara lain e-Commerce and

Telecommunication (Pemerintah Singapura dan AS, 2016); Digital Economy and South East Asia (Pemerintah Singapura dan Google); dan Collaborative Creative Learning and Action for Sustainable Solution (Co-CLASS) The Fourth Industrial Revolution System Transformation (Kementerian Perindustrian, United in Diversity, dan Tsinghua University, RRT, 2018).

Atas pengabdianya terhadap negara serta kecakapan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Sekjen Mira mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2017.

Dengan posisi dan jenjang karir yang semakin meningkat sejak menjadi aparatur sipil negara, ia kembali teringat akan cita-cita sederhananya sejak dulu, yaitu membangun rumah sakit dan meluncurkan satelit, yang didorong atas kegagumannya pada bidang teknologi sejak kecil.



Wujudkan Kominfo Connect

ASN Kominfo Diminta Adaptif Terhadap Transformasi Digital

Selasa, 12 Januari 2021, Tim Majalah Kominfo Next menyambangi Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba, untuk berdiskusi seputar program-program strategis dan ruang lingkup kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Kominfo. Sekaligus ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pandangannya sejak resmi mengemban tugas baru, terhitung sejak dilantik melalui sumpah jabatan pada 23 Desember 2020, dan bagaimana ia menerjemahkan arahan tugas baru yang diamanatkan Menkominfo Johnny G. Plate kepadanya.

Gerakan Namaste sebagai pengganti berjabat tangan dan ucapan mempersilakan masuk, mengawali diskusi ringan tim Kominfo Next dengan Sekjen Mira di sofa ruang kerjanya. Terasa bahwa beliau ingin obrolan siang itu mengalir senyaman mungkin. Ini menandakan bahwa Kominfo adalah tempat yang asik untuk berkarya bersama.

Mengawali perbincangan, Sekjen Mira memaparkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kesekjen Kominfo menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, anggaran hingga melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Dukungan administrasi tersebut meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup internal Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2018.

“Juga terkait pembinaan, penataan organisasi, tata laksana, pengelolaan BMN; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta fungsi lain

yang diberikan oleh Menteri Kominfo,” jelas Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba.

Karenanya ia berharap sivitas Sekretariat Jenderal Kominfo dapat terus berbenah untuk meningkatkan kualitas dan mutu kerja dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kominfo.

Lebih lanjut Sekjen Mira memaparkan, secara garis besar Kesenjangan membuat peta jalan (*roadmap*) tentang komunikasi dan informatika, termasuk di dalamnya semua unsur-unsur dari Eselon 1, yang kemudian digodok oleh Biro Perencanaan. Selain untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, juga membuat reformasi birokrasi yang baik.

“Karenanya kita perlu mengevaluasi dan menuntaskan Renstra (Rencana Strategis) sampai betul-betul tuntas, dengan *output* berupa perencanaan yang sangat matang dan siap untuk dieksekusi dan saling berbagi strategi dan perencanaan antarsatker, sehingga semua saling memahami pekerjaan satu sama lain,” ujarnya.

Kerja Kolaboratif

Untuk mewujudkan hal itu, menurut Sekjen Mira seluruh komponen di Kementerian Kominfo perlu menerapkan kerja kolaboratif agar cepat beradaptasi sesuai dengan perkembangan digital. Ia mengungkapkan, selama ini, proses kerja dan kinerja sudah berjalan dengan baik. Namun, tak boleh berpuas diri dan masih perlu berbenah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan terobosan agar Kementerian Kominfo menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi. Bagaimana ASN terlindungi, namun tanggung jawab masing-masing orang juga ditunaikan dengan baik.

Pandemi dapat mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya luar jaringan (*luring*) atau *offline* dengan kontak fisik berubah menjadi lebih banyak daring atau *online*





"Apalagi saat ini pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Pandemi dapat mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya luar jaringan (luring) atau *offline* dengan kontak fisik berubah menjadi lebih banyak daring atau *online*," paparnya.

Bahkan, digitalisasi dan penggunaan internet meningkat pesat di kalangan masyarakat sebagai solusi untuk menunjang aktivitas mereka agar bisa tetap produktif di tengah keterbatasan akibat pandemi ini. Mulai aktivitas belanja melalui *e-commerce* atau toko online, bekerja - *Work From Home (WFH)*, *virtual meeting*, dan aktivitas lain melalui perangkat digital. Memasuki era kenormalan baru (*the new normal era*), pemerintah juga mendorong akselerasi transformasi digital di berbagai kalangan, organisasi dan institusi sebagai solusi di era adaptasi kehidupan baru ini untuk mendukung berbagai layanan masyarakat.

Kementerian Kominfo pun menerapkan *Flexible Working Space*, ruang kerja fleksibel untuk beradaptasi dengan

pandemi. ASN yang bekerja di kantor diatur sedemikian rupa agar bisa meminimalkan potensi penularan COVID-19 sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

"Tentu dengan koordinasi, dukungan tim kerja baru, saya meyakini hal itu bisa terwujud dengan baik. Termasuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Kominfo dengan kementerian lembaga lainnya, serta seluruh pihak agar dapat mendukung visi dan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk akselerasi transformasi digital," tegasnya.

Bangun Pondasi TIK Melalui Renstra

Lebih lanjut, menjawab pertanyaan terkait bagaimana perspektif Sekjen Mira dalam melihat Presiden Jokowi mencanangkan Visi Indonesia 2045 yang salah satunya menjadikan Indonesia sebagai lima besar negara kekuatan ekonomi dunia dengan berpendapatan tinggi pada tahun 2040,

ia menyatakan dalam mengeksekusi visi tersebut dan mencapai masa keemasan itu, Kominfo telah bekerja keras membangun fondasi sejak saat ini melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

"Jadi, saya pikir melalui Rancangan Stategis Kominfo 2020-2024, sudah *acknowledge* isu tersebut, sudah merencanakannya ke dalam suatu perencanaan yang tersistematis. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita pastikan pelaksanaannya, karena pengalaman saya, perencanaan bisa selalu kita bikin, tetapi yang perlu diperkuat adalah agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana," tuturnya.

Sekjen Mira melanjutkan, dalam *roadmap* yang ditetapkan Kementerian Kominfo, pemerintah fokus membangun fondasi mulai 2020. Kemudian pada 2025, difokuskan pada pengoptimalan pelayanan. Pada 2030, ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Memasuki 2035, fokus pada peningkatan teknologi. Tahun 2040, ditargetkan Indonesia menjadi *digital leader*, dan 2045 menuju Indonesia maju.



Ahead the Curve Merespon Tantangan

Namun demikian, kata Sekjen Mira, yang menjadi tantangan Kominfo sekarang adalah bagaimana peran menjadi bukan lagi satu-satunya penyedia di pemerintah terkait infrastruktur digital, tetapi juga dituntut untuk berkoordinasi dengan kementerian lainnya supaya dapat memanfaatkan digital itu.

“Negara maju itu adalah pertumbuhan ekonominya harus berada di level 6 s.d 7%. Untuk Indonesia, kemarin posisinya di level 5%, apalagi sekarang kena COVID-19 jadi turun. Untuk naik dari 5 ke 6 hingga 7, itu harus dilakukan,” imbuhnya.

Apabila dianalisis lebih lanjut, Sekjen Mira menyatakan saat ini transformasi ekonomi di Indonesia telah bertransformasi dari era yang sangat tergantung kepada sumber daya alam, kini beralih ke manufaktur dan sektor jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.

“Nilai tambah itu bisa diciptakan dengan teknologi. Teknologi saat ini adalah teknologi digital, Making Indonesia 4.0 saja kuncinya IoT, AI, Big Data, segala macam, itu adalah di ranah digital. Artinya, kita melakukan transformasi digital bukan hanya karena untuk transformasi digital, tapi sebetulnya ini mempunyai misi yang lebih besar daripada itu. Jadi, visi 2045 Indonesia Emas menjadi negara maju. Kominfo Connect, Semakin Digital Semakin Maju,” tandasnya.

“Yang perlu kita jelaskan ke teman-teman di dalam maupun di luar Kominfo adalah konteks. Saya perhatikan, mungkin konteks digital bagi teman-teman yang mengerjakan transformasi digital di sini perlu diperkaya,” katanya.

Dalam pandangan Sekjen Mira, Kominfo saat ini berusaha untuk kekinian dalam arti merespon isu yang besar di masanya, di mana digital lanskap yang sekarang sangat berbeda di tahun 2006 – 2015. Kalau dulu Kominfo itu lebih lebih ke arah dalam hanya dengan industrinya, sekarang peran Kominfo bukan hanya dengan industrinya saja melainkan turut melibatkan juga regulator dari kementerian lainnya.

“Jadi, pada waktu 2006 - 2015 kita masih menyebutnya sektor TIK. Dalam pandangan saya, yang namanya sektor itu adalah vertikal, antara pemerintah dengan industri yang jadi kulitnya, sehingga Kominfo itu menjadi satu-satunya badan atau agensi pemerintah (kementerian) yang menangani sektor publik dan memanfaatkan

menyediakan memanfaatkan sektor TIK. Tetapi kalau sekarang, digital itu sudah menjadi suatu platform yang bisa digunakan multipihak,” tuturnya.

Dalam perbincangan selama kurun waktu satu jam itu, ia pun menerangkan konsep atau kerangka Transformasi Digital yang sedang dirancang. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, pola pikir. Kedua, visi dan *digital leadership*. Ketiga, *enabling policies*.

“Kalau pola pikirnya masih sendiri dan tidak mau kolaborasi, ya tidak akan bisa bertahan di dunia digital. Karena kebijakan itu yang pada akhirnya akan menentukan apakah kita bisa merealisasi atau tidak. Kebijakannya tidak boleh kaku atau menggunakan paradigma lama sehingga bisa ada ruang inovasi,” tegasnya.

Layer prasyarat berikutnya adalah infrastruktur, termasuk aplikasi; keamanan, perlindungan, dan pemanfaatan data; *talent* (SDM) dan literasi; serta keamanan siber. Prasyarat ini dipenuhi dengan menggunakan *enabler technology* seperti *drone and robots*, mobil tanpa awak, *custom manufacturing and 3D printing*, *artificial intelligence*, *IoT*, *big data analytics*, *cloud*, dan teknologi lainnya. Untuk merealisasikannya ada beberapa “PR” mulai dari infrastrukturnya, SDM, hingga regulasi sampai ke hal-hal seperti termasuk perlindungan data.

“Sekarang yang menjadi ‘PR’ adalah mempercepat *roll-out* infrastruktur, tapi isunya juga sudah bertambah ke pemanfaatannya. Kalau dulu kan digitalnya itu berkembang, Kominfo mengikuti, sekarang kalau bisa Kominfo sudah *ahead the curve*, sudah punya misi ke depan bagaimana bisa *men-drive* ekosistem digitalnya,” pungkasnya.

Bumi Dipijak Langit Dijunjung

Prinsip Sekjen Kominfo Wujudkan Transformasi Digital

Bumi Dipijak Langit Dijunjung



Memimpin sebuah organisasi besar tidak terlepas dari pembawaan karakter dan prinsip seorang pemimpin. Demikian halnya prinsip yang ditanamkan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba. Berbekal pengalaman di berbagai institusi pemerintahan dan swasta, Sekjen Kominfo memiliki prinsip menarik, yakni Bumi Dipijak Langit Dijunjung.

Bagaimana korelasi prinsip tersebut yang akan diejawantahkan dalam bentuk kinerjanya di Kementerian Kominfo?

Sekjen Kominfo menjawab ihwal prinsip itu dalam pandangannya mengenai transformasi digital, yang merupakan bagian penting peran Kementerian Kominfo. Sebagaimana diketahui bahwa transformasi digital menjadi salah satu misi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia dikenal sebagai bangsa digital di masa depan.

Industri teknologi digital, menurutnya, memiliki peran penting di hampir semua sektor kehidupan manusia. Pemahaman akan pentingnya digitalisasi juga perlu diimplementasikan terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kominfo. Guna mewujudkan transformasi digital Sekjen Kominfo menginginkan kerja-kerja ASN harus berlandaskan pada misi. Sebab, berjuang untuk mencapai suatu tujuan bukan saja berasal dari satu sudut pandang semata.

Salah satu cara bekerja berlandaskan misi adalah gaya kepemimpinan. Berangkat dari pengalaman panjang, Sekjen Kominfo menilai seorang *leader* pada hakikatnya bisa berada di depan, di samping, maupun juga berada di belakang, tergantung pada situasi yang kemudian dihadapi. Dalam situasi tertentu, idealnya sang pemimpin harus di depan untuk memberikan arah dan juga sebagai pembuka jalan.

Setiap pemimpin, lanjutnya, tentu dikenal dengan ciri khas kepemimpinan yang berbeda-beda. Sekjen Mira sendiri melihatnya lebih kepada bagaimana seorang pemimpin berusaha mendekatkan diri dan mengenal semua ASN yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

Terlebih lagi perempuan dengan segudang ilmu yang dijuluki 'Ratu E-Commerce' ini terbilang baru di Kementerian Kominfo, sehingga memerlukan adaptasi untuk mengenal lebih dekat budaya kerja di 'dermaga baru'. Hal tersebut yang kemudian menjadi prinsipnya, bahwa di mana bumi dipijak maka di situlah langit dijunjung.

Sekjen Kominfo juga berbagi pengalaman menarik selama mengabdikan kepada negara di berbagai institusi pemerintahan. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di antaranya Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (2015-2017), Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif (2017-2019), Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019-2020), dan Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan SDM (2020). Sebelumnya, Sekjen Mira menduduki jabatan sebagai Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada tahun 2006-2015.

Tiga kementerian strategis yang memiliki budaya kerja yang berbeda menjadi catatan pengalaman tersendiri yang menurutnya tentu memperkaya khasanah berpikir. Namun, meskipun saat ini mengemban amanah sebagai Sekjen Kominfo, eks Wakil Ketua Manajemen Pelaksana e-commerce ini juga tidak ingin menanamkan sikap egosentris dalam berorganisasi. Oleh karena itu, sejak dilantik pada 23 Desember 2020 lalu ia memilih untuk lebih dahulu mengenal seperti apa budaya kerja di Kementerian Kominfo, tidak datang dengan memaksakan suatu pola tertentu.



Kolaborasi Satker

Selain melihat budaya kerja di Kementerian Kominfo secara umum, Sekjen Mira juga ingin mempelajari bagaimana kolaborasi dan gaya koordinasi antar satuan kerja (Satker). Sejak dilantik hingga saat ini, ia sudah mengantongi beberapa catatan yang menurutnya secara perlahan harus diperbaiki. Sebab Kementerian Kominfo sebagai institusi terdepan dalam hal digitalisasi harus memiliki *tools*.

Sekjen Kominfo meyakini bahwa seluruh ASN Kominfo di semua Satker telah melakukan yang terbaik untuk negara dan masyarakat melalui budaya kerja yang terbangun. Hal tersebut menjadi dorongan dan semangat tersendiri baginya, sejak bergabung menjadi keluarga besar Kementerian Kominfo. Artinya, kolaborasi pengalaman yang sudah dipetik sejauh ini bisa diterapkan untuk mengajak masing-masing satker arah yang lebih koheren dan yang lebih fokus ke satu tujuan, yaitu transformasi digital.

Kerja kolaborasi diakui Sekjen Kominfo merupakan suatu tantangan, apalagi menyoal digitalisasi yang memang harus membuka koordinasi masif, baik antarsatker maupun

antarkementerian dan lembaga lain yang terikat. Terkait hal ini, Sekjen Mira melihat satu hal positif atas kebiasaan yang diciptakan oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate, yaitu dengan sering mengadakan pleno.

"Jadi kalau dulu setiap Ditjen mungkin sibuk dengan fungsinya masing-masing, sehingga ia tidak terlalu memperhatikan sebetulnya *output*-nya itu bisa menjadi input bagi Ditjen yang lain, atau bagaimana bersinergi dengan Ditjen yang lain. Dengan pleno, kita jadi paham Ditjen ini mengerjakan itu, Ditjen yang lain mengerjakan ini, saya bisa masuk di mana. Itu adalah suatu kebiasaan baru yang saya pikir sangat baik. Itu baru di tataran pimpinannya, di tataran yang lebih teknis juga harus dibiasakan. Sayangnya kita sekarang dalam masa pandemi tidak bisa untuk masif bertemu sekian banyak orang, tapi dalam bayangan saya kita mungkin harus melakukan *Gathering* Kementerian, misalnya Pak Menteri memberikan arahan-arahan seperti yang dilakukan pada acara Menkominfo Menyapa tanggal 4 Januari kemarin, itu sudah versi lain karena harus dilakukan secara virtual," kata Sekjen Mira mengulas arahan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.



Harapan untuk CPNS Kominfo

Sekjen Mira turut menyampaikan, Menteri Kominfo Johnny G. Plate secara khusus memberikan arahan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi digital melalui pengelolaan manajemen organisasi yang baik. Tentu arahan lain secara umum kepada Kesekjenan, agar dalam kepemimpinannya Sekjen Mira semakin memperkuat ekosistem Kominfo dalam konteks yang lebih besar, terutama sebagai koordinator digital secara nasional.

Harapan Menteri Kominfo akan terwujud apabila komitmen ASN juga betul-betul ditanamkan, dan mampu mengimplementasikan suksesi kinerja untuk menghantarkan Indonesia menuju era transformasi digital.

Harapan itu pun ditujukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian

Kominfo tahun 2020. "CPNS Kementerian Kominfo harus memiliki semangat kerja yang tinggi dan mampu membaca perkembangan zaman di mana industri teknologi digital telah menjadi kebutuhan penting saat ini. Perlu diketahui bahwa profesi PNS berdasarkan studi menduduki posisi kedua yang paling diminati setelah profesi pengusaha. Kerja-kerja PNS yang atraktif, produktif dan menghasilkan karya untuk bangsa adalah sebuah apresiasi yang patut dibanggakan," jelas Sekjen Mira.

Menurutnya, profesi PNS saat ini berbeda dengan PNS jaman dulu, di mana dulunya muncul stigma PNS yang malas bekerja, lambat, diam saja tapi tetap naik pangkat, dan seterusnya. Namun di era teknologi digital ini justru tidak seperti itu, karena segala sesuatu dilihat dari kinerja.

"Jadi kemarin saya titipkan ke CPNS supaya menggali potensi mereka, berkontribusi kepada Kominfo karena yang dilihat adalah kinerjanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah budaya kolaborasi. Kalau dulu, mungkin di sekolah siapa yang belajar sendiri dia akan bisa. Sekarang dalam satu tim tidak bisa seperti itu, semuanya harus kompak, tidak bisa hanya beberapa orang saja. Itu secara garis besarnya," kata Sekjen Mira

Kembali pada prinsip Sekjen Kominfo tentang di mana bumi dipijak maka di situlah langit dijunjung, yang kemudian menggambarkan bagaimana pola kerja, strategis dan manajemen organisasi serta kolaborasi dan koordinasi yang diterapkan dengan baik akan mencapai misi transformasi digital. Dalam arti lain, ketika transformasi digital telah menyentuh semua kehidupan masyarakat, maka negara telah membuktikan kehadirannya kepada masyarakat. Sebaliknya, transformasi digital tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi bersama pemerintah. Sudah saatnya dan sudah waktunya Indonesia harus bertransformasi lebih cepat dan lebih tepat. Inilah harapan dan mimpi besar Sekjen Kominfo Mira Tayyiba.

Selamat dan Sukses Atas Pelantikan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian Kominfo

Mira Tayyiba

Sekretaris Jenderal

Hary Budiarto

Kepala Badan Litbang SDM





Anak Muda & Hukum di Indonesia

Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR pada Oktober 2020 lalu. Salah satu hal yang dimuat dalam UU tersebut terkait Sektor Penyiaran yang mengarah pada migrasi TV Digital pada tahun 2022.

Salah satu personil yang berkontribusi dalam penyusunan RUU Cipta Kerja adalah Indra Maulana. Pria kelahiran Februari 1983 ini merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2005. Pada tahun 2007, Indra melanjutkan pendidikannya di *Master of Laws (LLM) on Law and Technology Tilburg Law School, Universiteit Van Tilburg, Netherlands* dan lulus setahun kemudian.

Indra |
| Maulana

Ketertarikan Indra pada dunia hukum sudah tumbuh saat momentum reformasi 1998. Indra yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA melihat bahwa hukumlah yang membawa Indonesia bermigrasi dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Indra memutuskan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan spesialisasi di bidang hukum sebagai pilihan karir untuk berkontribusi kepada negara.

Selain sebagai Tim Penyusun RUU Cipta Kerja, Indra pun ikut andil menjadi Tim Penyusun RUU Keterbukaan Informasi Publik; Tim Penyusun RUU Penyiaran; dan tim Tim Penyusun berbagai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Saat ini, Indra sedang menjadi Tim Penyusun RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

Pria yang pada tahun ini genap berumur 38 tahun, aktif di berbagai Konferensi Internasional bidang Pos, Telekomunikasi,

dan Penyiaran sebagai delegasi Indonesia, serta menjadi Kuasa Hukum Menkominfo dalam penyelesaian berbagai Perkara di Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Perjalanan karir Indra di Kementerian Kominfo dimulai dengan menjadi Kasubbag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Setditjen PPI pada tahun 2008-2010 yang dilanjutkan menjadi Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan, Setditjen PPI pada tahun 2011-2012. Pada tahun 2017 – 2020 Indra diberikan kepercayaan menjadi Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama. Terakhir, Indra menjadi Analis Hukum Ahli Madya - Koordinator Hukum dan Kerja Sama di Setditjen PPI.

Menurut Indra, berkarir sebagai ASN pada Kementerian Kominfo membuktikan bahwa hukum selalu berkembang, tidak konservatif, dan tidak boleh ketinggalan zaman. Indra dan ASN lainnya harus terus berpikir *ahead of the curve* (selalu berpikir ke depan dan memberikan nilai lebih kepada masyarakat).

“

Harus terus berpikir *ahead of the curve*, selalu **berpikir ke depan** dan **memberikan nilai lebih** kepada masyarakat



Migrasi TV Analog ke Digital

Peran Kementerian Kominfo sebagai regulator dalam UU Cipta Kerja Sektor Penyiaran adalah melakukan percepatan transformasi digital berupa kepastian migrasi TV analog ke digital beserta kepastian tenggat waktu *Analog Switch Off (ASO)*. Urgensi dari migrasi tersebut adalah kebutuhan masyarakat akan informasi dan tayangan yang lebih berkualitas serta dunia internasional yang sudah beralih ke tv digital. Selain itu, dukungan akan teknologi tv analog semakin susah didapatkan pun menambah urgensi migrasi tersebut.

Dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja Sektor Penyiaran adalah terbukanya pemanfaatan *digital dividend* spektrum frekuensi radio di pita 700MHz untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, penanganan kebencanaan, dan peningkatan pemanfaatan *broadband* melalui teknologi 5G. Selain itu, dengan adanya UU Cipta Kerja Sektor Penyiaran mewujudkan payung hukum agar lebih optimal dalam penyehatan industri telekomunikasi dan penyiaran serta optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, kemudahan perizinan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam masa Pandemi COVID-19 melalui dukungan infrastruktur dan kebijakan di Sektor Kominfo.

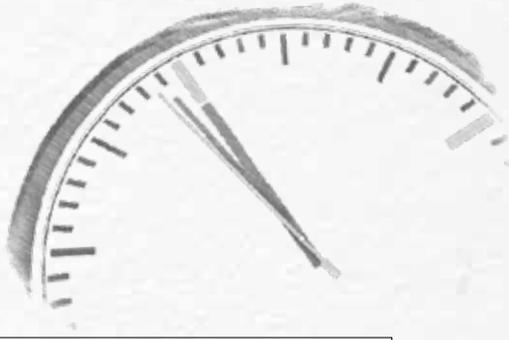
Tentunya Indra dan tim mengalami berbagai kesulitan dalam menyusun UU Cipta Kerja Sektor Kominfo. Waktu yang singkat dan dilakukan di tengah masa Pandemi COVID-19, membuat mobilitas dan ruang gerak menjadi terbatas. Indra dan tim harus beradaptasi dengan cepat terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam melaksanakan koordinasi.

“

Dampak dari berlakunya UU Cipta Kerja Sektor Penyiaran adalah terbukanya pemanfaatan **digital dividend** spektrum frekuensi radio di pita **700MHz** untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, penanganan kebencanaan, dan peningkatan pemanfaatan *broadband* melalui teknologi 5G.



Dalam menyusun UU Cipta Kerja, Indra dan tim melakukan berbagai strategi agar **selesai tepat pada waktunya**, yaitu:

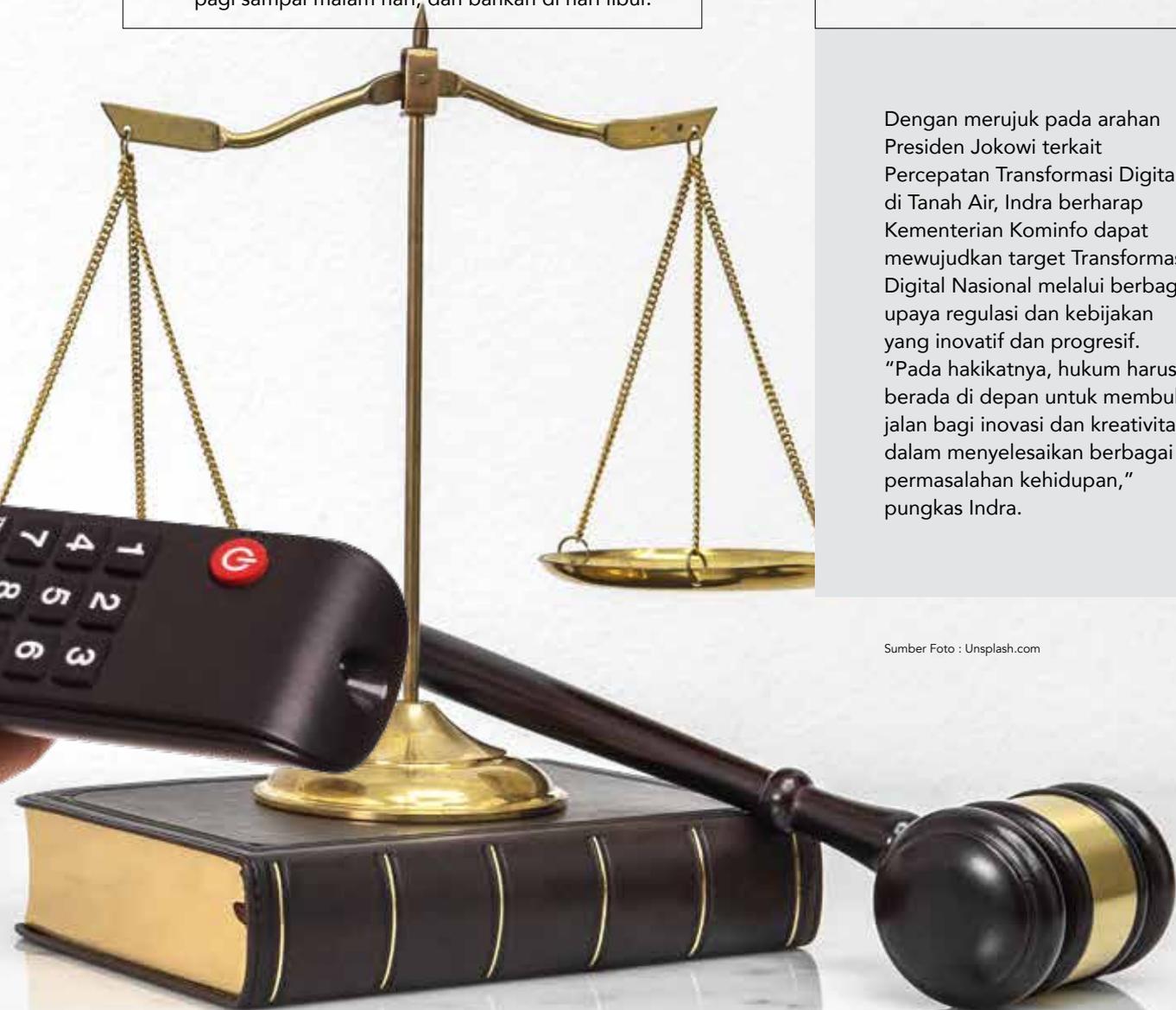


- Pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan berbagai rapat dan koordinasi.
- Pelibatan secara intensif kementerian dan lembaga dengan menunjukan PIC pada setiap Kementerian/ Lembaga.
- Kerja ekswaktu, di mana rapat-rapat dan konsolidasi untuk penyusunan aturan diadakan sejak pagi sampai malam hari, dan bahkan di hari libur.

- Pengambilan keputusan yang cepat melalui penyampaian laporan secara berkala kepada pimpinan dan eskalasi substansi pada Sidang Kabinet/ Rapat Terbatas Kabinet, rapat antarkementerian/ lembaga, dan pembahasan rapat antara pimpinan Tim Pemerintah dengan Tim DPR RI;
- Pelibatan akademisi/pengamat/ ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Strategi komunikasi yang efektif.

Dengan merujuk pada arahan Presiden Jokowi terkait Percepatan Transformasi Digital di Tanah Air, Indra berharap Kementerian Kominfo dapat mewujudkan target Transformasi Digital Nasional melalui berbagai upaya regulasi dan kebijakan yang inovatif dan progresif. "Pada hakikatnya, hukum harus berada di depan untuk membuka jalan bagi inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan," pungkas Indra.

Sumber Foto : Unsplash.com



Tahapan Digitalisasi

Sudah hampir satu tahun Pandemi COVID-19 melanda Ibu Pertiwi. Selama itu pula, pemerintah terus bergerak dan berimprovisasi agar bisa berdamai dengan COVID-19 ini. Berdamai dalam arti bahwa selain tetap menggulirkan program-program penanganan pandemi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan mengubah cara kerja, beraktifitas, belajar, hingga cara bertransaksi, dari sebelumnya secara fisik (*offline*) menjadi secara daring (*online*).

“

Pandemi ini harus dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital

Presiden Joko Widodo



5

Dilansir dari akun instagram @jokowi, Presiden Jokowi menyampaikan **5 (lima) langkah percepatan transformasi digital :**

/ *Pertama* /

percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, seperti penyediaan layanan internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik.

/ *Kedua* /

meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.

/ *Ketiga* /

integrasi pusat data nasional dipercepat.

/ *Keempat* /

kebutuhan sumber daya manusia talenta digital disiapkan. Indonesia membutuhkan talenta digital kurang lebih sembilan juta orang untuk 15 tahun ke depan, atau sekitar 600 ribu per tahun.

/ *Kelima* /

terkait perencanaan transformasi digital, perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

Transformasi

Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menggambarkan kondisi masyarakat kita yang saat ini sudah atau akan berada pada tahap Transformasi Digital. Tentunya, sebelum kita mencapai tahap ini, ada beberapa tahapan lainnya yang telah kita lalui dalam lingkup perkembangan era digital. Apa saja tahapan itu? Yuk kita simak Sobatkom.

Tahap yang pertama yaitu **Digitasi**. Menurut IT Glossary Gartner, digitasi adalah perubahan dari data yang semula berbentuk analog menjadi digital. Dalam dunia rekaman, format rekaman kaset berubah menjadi format digital mp3, video VHS menjadi format mp4 dan sebagainya. Digitasi juga terjadi dalam kehidupan perkantoran, di mana surat-surat yang semula berbentuk cetakan kertas, saat ini sudah digantikan dengan surat dengan format digital atau *paperless*.

Tahap kedua yaitu **Digitalisasi**. Pada tahap ini, kita berbicara pada ranah proses bisnis atau alur kerja. Proses bisnis yang semua dijalankan secara konvensional baik tatap muka maupun secara fisik surat, berubah menjadi proses secara daring dan

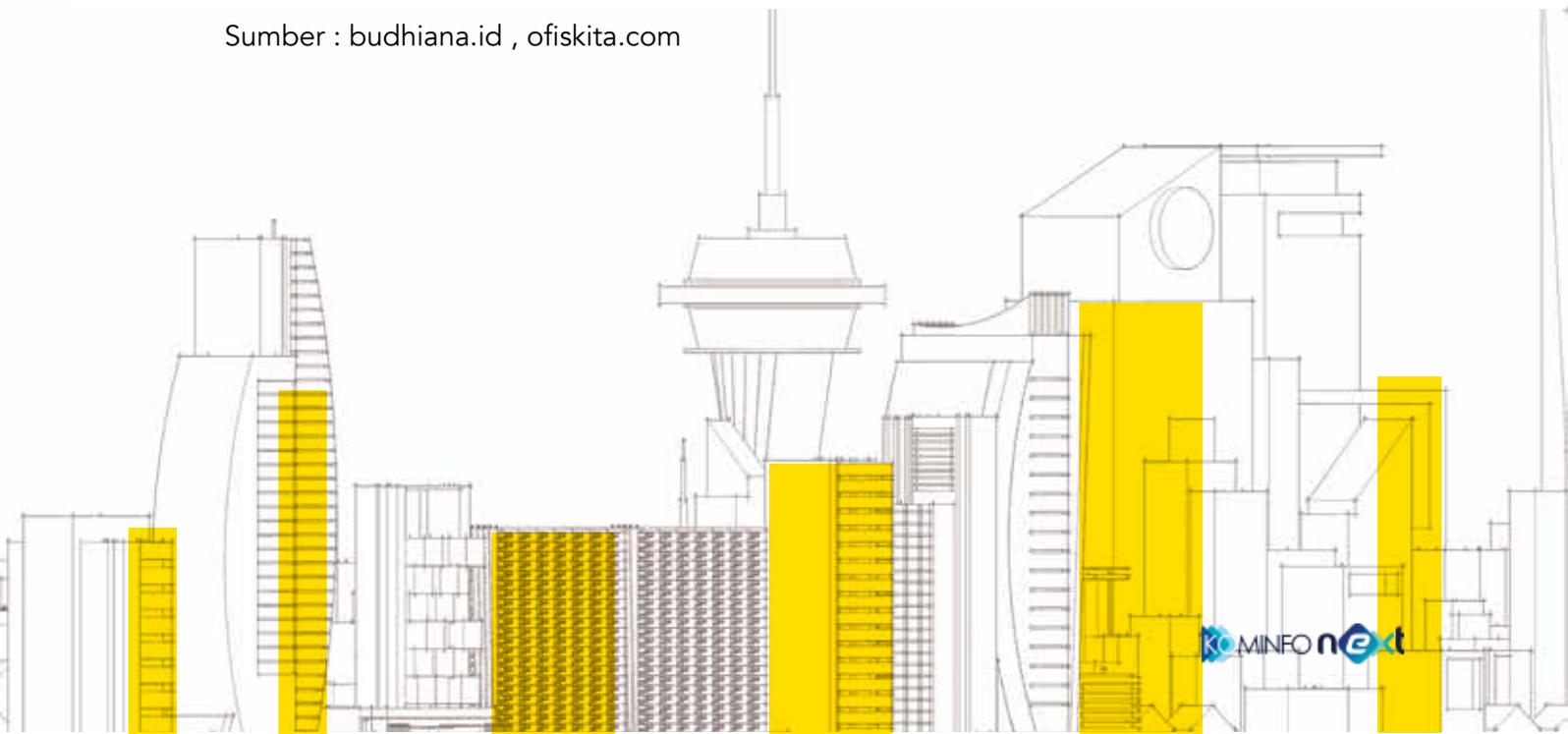
paperless. Segala bentuk transaksi juga dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam lingkup organisasi, tahap ini biasanya dikaitkan dengan penurunan biaya operasional dan juga peningkatan performa proses bisnis. Organisasi akan meneliti dan mencermati lebih jauh, proses bisnis apa saja yang bisa dikonversi menjadi proses digital, sehingga pemanfaatan sumber daya manusia, waktu dan biaya dapat dialokasikan secara lebih efisien.

Berlanjut ke tahap selanjutnya, tahap yang akan kita songsong bersama yaitu **Transformasi Digital**. Suatu organisasi disebut telah mengimplementasikan transformasi digital ketika pemanfaatan kemajuan IT tidak hanya terbatas pada proses digitisasi dan digitalisasi, tetapi sudah bertransformasi untuk bisa membuat model bisnis maupun alur kerja baru. Alur kerja ini berkembang dan memberikan manfaat-manfaat lebih bagi organisasi, tentunya dengan memanfaatkan TIK. Jika kita merujuk pada kondisi saat ini, pemanfaatan *cloud computing*, *big data*, *artificial intelligence*, menjadi ranah yang bisa dimanfaatkan bagi organisasi untuk mengimplementasikan transformasi digital.

Transformasi Digital

	Digitasi	Digitalisasi	Transformasi Digital
Fokus	Konversi format data	Pemrosesan informasi	Pemanfaatan <i>knowledge</i>
Tujuan	Mengubah dari format analog ke digital	Otomatisasi proses bisnis	Mengubah pola pikir dan cara kerja masyarakat / organisasi
Aktivitas	Mengubah dokumen fisik, foto, video, tanda tangan menjadi format digital	Mengubah proses bisnis / alur kerja menjadi digital	Membentuk maupun mengubah organisasi untuk berpikir dan bekerja dengan budaya digital
Tools	Komputer, <i>encoder</i> , <i>scanner</i> dan alat perubah format lainnya	Sistem dan Aplikasi TIK	Matriks terkait teknologi digital, <i>cloud computing</i> , <i>big data</i> , <i>artificial intelligence</i>
Tantangan	Volume, material	Harga, SDM	Penolakan dari SDM
Contoh Implementasi	Melakukan <i>scan</i> dokumen kertas menjadi file digital	Proses registrasi yang dilakukan secara <i>online</i>	Seluruh proses dilakukan secara digital, baik dari mulai registrasi maupun pengiriman konten

Sumber : budhiana.id , ofiskita.com



Sambut 2021, Presiden: Indonesia Mampu Bangkit



Foto: BPMI Setpres

Selama tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara telah mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian dunia. Bangsa Indonesia pun tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini.

Namun, dalam pernyataannya di penghujung tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur karena tetap mampu menghadapi persoalan global tersebut.

“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran,”

ujarnya dalam tayangan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 31 Desember 2020.

Meski diterpa dampak pandemi, Indonesia saat ini masih tetap dapat menjalankan roda kehidupan. Masyarakatnya juga mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini dapat segera diatasi dan menyelesaikan satu per satu dampak perekonomian yang ditimbulkan.

Kepala Negara optimistis bahwa memasuki tahun 2021, Indonesia mampu bangkit dan melahirkan banyak inovasi. Demikian halnya kondisi perekonomian yang akan berangsur membaik.

“Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik. Mulai terasa di kuartal ke-3 dan 4 tahun 2020. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan industri masa depan sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak harus berkomitmen untuk dapat menghentikan wabah ini dengan segera. Di sisi pemerintah, pemerintah akan terus berupaya mengendalikan COVID-19 dan melakukan program vaksinasi di tahun 2021 untuk menghentikan penyebarannya.

Adapun di sisi masyarakat, Presiden Joko Widodo meminta ditingkatkannya kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan serta tidak menganggap remeh penyebaran COVID-19.

“Semua orang, semua orang, harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan: pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021,” kata Presiden.

Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama mengatasi ujian berat yang dirasakan sepanjang tahun 2020 ini. Dengan komitmen dan kedisiplinan yang kuat, Kepala Negara berharap agar tahun 2021 menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita.

“Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.”



Presiden:

Anggaran Besar Harus Berdampak dan Beri Daya Ungkit bagi Perekonomian



Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan secara virtual dalam acara penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Januari 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.

Hal itu disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumat, 15 Januari 2021, Presiden menyaksikan secara virtual penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan PUPR untuk tahun anggaran 2021.

“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.

“Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.”

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun.

“Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun,” ucap Basuki.

Paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama di sektor infrastruktur padat karya, adalah hal yang sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.

Namun, meski harus bekerja cepat, tata kelola pemerintahan tentunya tidak boleh diabaikan. Segala proses yang dilakukan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting *outcome*-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tandasnya.

Presiden Jokowi Menerima **Vaksin COVID-19** Perdana



Vaksinator, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM., menyuntikkan vaksin CoronaVac produksi Sinovac kepada Presiden Joko Widodo di teras Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 13 Januari 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 13 Januari 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, menjadi orang pertama yang menerima vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19.

Sekitar pukul 09.36 WIB, Presiden tampak berjalan menuju teras Istana Merdeka yang telah ditata seperti tempat simulasi vaksinasi di puskesmas beberapa waktu lalu. Sebelum disuntik vaksin, Presiden terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta penapisan kesehatan dan pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah.

Hasil penapisan kesehatan oleh petugas menunjukkan suhu tubuh Presiden saat diperiksa adalah 36,3 derajat celsius dan tekanan darah 130/67 mmHg. Presiden juga menjawab sejumlah pertanyaan seputar riwayat kesehatan hingga dinyatakan sehat dan layak mengikuti vaksinasi.

Kepala Negara kemudian menuju meja berikutnya di mana proses penyuntikan dilakukan. Adapun yang bertindak selaku vaksinator presiden adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM dengan dibantu seorang asisten yang mempersiapkan peralatan.

Vaksinator tampak menyuntikkan vaksin di lengan kiri Presiden Jokowi, sekitar pukul 09.42 WIB. Proses penyuntikan pun berjalan dengan aman dan lancar.

Untuk diketahui, vaksin yang disuntikkan kepada Presiden adalah vaksin CoronaVac buatan Sinovac Life Science Co.Ltd. yang bekerja sama dengan

PT. Bio Farma (Persero). Vaksin tersebut telah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan 1.620 relawan di Bandung.

Vaksin tersebut juga telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Usai penyuntikan, Presiden mengikuti proses observasi kemungkinan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) di Ruang Oval, Istana Merdeka, selama sekitar 30 menit. Presiden tampak berkegiatan seperti biasa setelah proses vaksinasi dan tampak berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Vaksin Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Untuk itu, para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, saat memberikan keterangan pada Rabu, 16 Desember 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

"Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," tuturnya saat itu. (BPMI Setpres)

“Bagaimana,
Pak?”

tanya vaksinator.

“Tidak terasa
sama sekali,”

jawab Presiden.



Presiden: Vaksinasi adalah “Game Changer” dalam Pengendalian Pandemi



Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersikap optimistis di awal tahun 2021 yang diyakini akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang melanda sejak tahun lalu. Kesehatan masyarakat diharapkan akan segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali.

Saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal.

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah *game changer*, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita segera bangkit,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021.

Program vaksinasi COVID-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi telah dimulai dua hari lalu, Rabu (13/1). Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin juga telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar.

Sebelumnya, penelitian dasar ilmiah dan sejumlah uji klinis telah dilakukan sejak bulan Agustus sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA). Hasil efikasi vaksin yang diuji sudah di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan. Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan siap sejak beberapa bulan yang lalu.

“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” jelas Presiden.

Tanggal 13 Januari yang lalu, Kepala Negara dan beberapa perwakilan dari berbagai golongan sudah divaksin dosis pertama. Kemarin, 14 Januari 2021, juga telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi. Adapun hari ini, 15 Januari 2021, vaksinasi perdana juga dilakukan di 8 provinsi.

“Saya telah perintahkan agar proses vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda. Presiden memerinci, vaksin akan datang sebanyak kurang lebih 3 juta di bulan Januari, 4,7 juta di bulan Februari, 8,5 juta di bulan Maret, 16,6 juta di bulan April, 24,9 juta di bulan Mei, dan 34,9 juta di bulan Juni.

“Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat, meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan,” katanya.

Dengan vaksinasi massal ini, Presiden berharap akan muncul kekebalan komunal sehingga resiko penyebaran COVID-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali.

“Inilah kerja besar yang ingin kita kerjakan dan kita meminta kesadaran kita semuanya, meskipun nantinya sudah divaksin, saya minta protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut dari Istana Kepresidenan Bogor yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.





Presiden berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak. Foto: BPMI Setpres/Kris

Presiden Luncurkan Bantuan Tunai Tahun 2021 **se-Indonesia**

Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan

dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“

Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai.



Perkuat Sektor Pertanian Nasional dengan **Skala Ekonomi dan Teknologi**



Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.

“Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain,” ujarnya.

Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.

Presiden mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.

“Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,” kata Presiden.

Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.

“Oleh sebab itu kenapa saya dorong *food estate* ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” imbuhnya.

Kepala Negara melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor.

Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” tutur Presiden.

Turut hadir dalam acara Rakernas tersebut di antaranya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahliil Lahadalia, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.



Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy Reborn

MISS LAMBE HOAKS VS FACT BOY | MISS LAMBE HOAKS VS FACT BOY



← Miss Lambe Hoaks
in "Forward Whatsapp
Keluarga" We Trust



Fact Boy →
Mantan Sad Boy namun
selalu Good Boy





Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy

Derasnya arus informasi yang mewarnai jagat maya tetap perlu diwaspadai. Pasalnya informasi palsu atau kabar bohong atau hoaks masih sering ditemukan oleh masyarakat melalui *platform digital*. Sejak bulan Agustus 2018 hingga bulan Oktober tahun 2020 saja sudah ditemukan 7224 hoaks yang beredar di tengah masyarakat dengan beragam kategori seperti politik, pemerintahan, kesehatan dan lainnya.

Maka dari itu, sejak bulan Januari tahun 2019, Biro Humas Kementerian Kominfo sudah menyediakan media penyampaian isu hoaks yang sedang *viral* di masyarakat melalui program Miss Lambe Hoaks. Pertama kali mengudara pada 24 Januari 2019 di kanal Youtube resmi Kemkominfo TV, program Miss Lambe Hoaks mengupas tuntas hoaks yang viral dan berdampak kepada masyarakat

Pada awalnya, Miss Lambe Hoaks ditayangkan sebanyak dua kali seminggu setiap hari Senin dan Kamis. Dalam setiap episode, Miss Lambe membawakan lima hoaks viral beserta faktanya yang berhasil dikumpulkan oleh mesin AIS Kominfo. Dengan pembawaan yang ceriwis dan asik, Miss Lambe Hoaks mendapatkan tempat di hati masyarakat. Bahkan, Miss Lambe Hoaks sempat menjadi nominasi pada ajang tahunan *Anugerah World Summit on the Information Society (WSIS Prizes)* tahun 2020. Program Miss Lambe Hoaks menjadi salah satu nominasi pada category 17 — *Action Lines C10 "Ethical dimensions of the Information Society*, sebagai karya unggulan dari Indonesia.

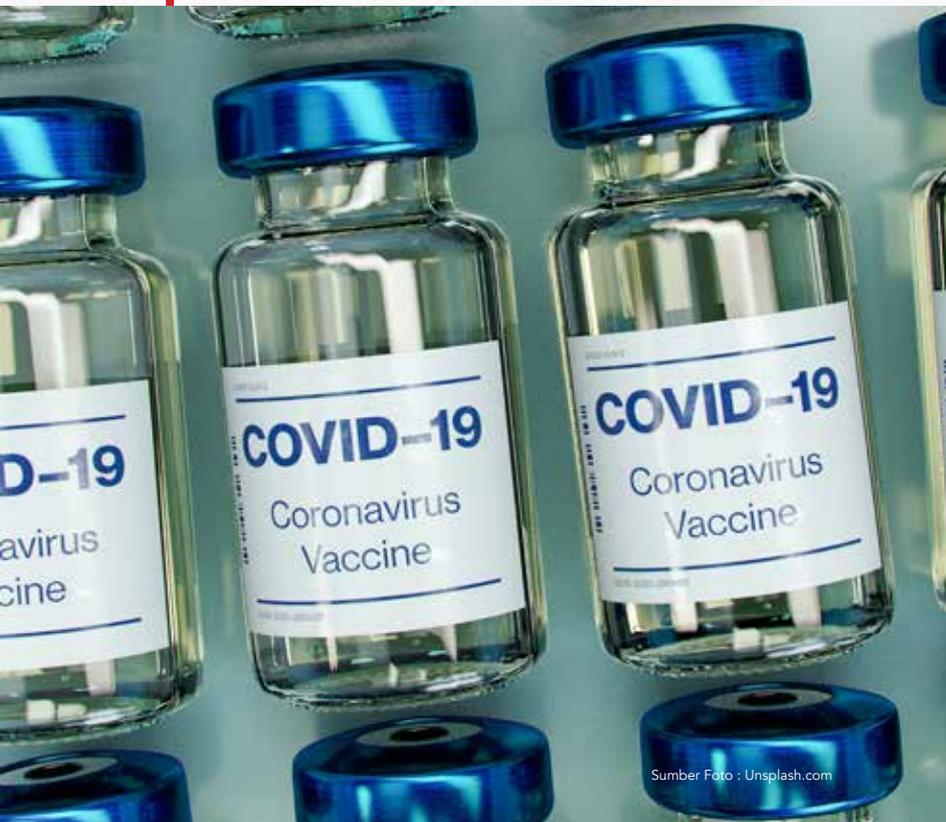
Sayangnya, penayangan Miss Lambe Hoaks sempat terhenti dikarenakan satu dan lain hal sehingga Miss Lambe Hoaks tidak dapat memberikan informasi berita hoaks yang sedang *viral*. Akhirnya, pada bulan Desember 2020, Miss Lambe Hoaks kembali menyapa masyarakat dengan format yang lebih baru. Saat ini, Miss Lambe Hoaks tidak akan tampil sendiri lagi. Ia mengajak seorang rekan yang akan melengkapi aksinya dalam mengupas tuntas hoaks bernama **Fact Boy**.

Dalam format program barunya, Miss Lambe Hoaks Reborn akan berduet bersama Fact Boy yang merupakan seseorang yang menjelaskan setiap fakta dari seluruh hoaks yang ada dan setia menangkal hoaks dari data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi, kali ini tugas Miss Lambe Hoaks hanyalah menyampaikan hoaks apa saja yang sedang menjadi perbincangan dan *viral* di tengah masyarakat.

Pada tayangan perdananya, Miss Lambe Hoaks menyebarkan 5 informasi hoaks seputar COVID-19, termasuk diantaranya informasi hoaks seputar Presiden Joko Widodo yang positif COVID-19, meminum minyak kayu putih yang dapat menyembuhkan COVID-19, hingga *Thermogun* yang dapat merusak otak.

Dengan *chemistry* dan perdebatan antara Miss Lambe Hoaks dan Fact Boy, Miss Lambe Hoaks Vs Fact Boy membawa warna baru dalam penyampaian informasi hoaks kepada masyarakat. Program Miss Lambe Hoaks vs Fact Boy ini akan tayang secara reguler yaitu setiap dua minggu sekali pada hari Jumat di kanal Youtube Kemkominfo TV. Sebagai salah satu program literasi digital, program ini diharapkan dapat membuat masyarakat tidak mudah termakan oleh informasi hoaks yang beredar dengan cara yang lebih segar, menyenangkan dan menghibur sehingga informasi tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Program Vaksinasi Nasional, Upaya Negara Demi Tercapainya *Herd Immunity*



Sumber Foto : Unsplash.com

Penyuntikan Vaksinasi COVID-19 perdana kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu, 13 Januari 2021, menandai dimulainya program vaksinasi nasional secara gratis di seluruh Indonesia. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah vaksin Sinovac yang digunakan memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan kepastian fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski demikian, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kemampuan vaksin tersebut. Hal ini dikarenakan vaksin Sinovac memiliki efikasi hanya sebesar 63,5 persen di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis di negara lain.

Keraguan ini dijawab oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam agenda International

Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/1/2021). Prof. Wiku menjelaskan bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi COVID-19, dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau *herd immunity*.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi di atas 50 persen dapat diterima. Kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Prof. Wiku saat menjawab pertanyaan media.

Jubir Satgas COVID-19 tersebut menegaskan, pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan terus mengikuti hasil uji klinis vaksin COVID-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin.

Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi. Dalam prosesnya, pemerintah bersikap

transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin COVID-19.

Antisipasi Strain Virus Baru

Pemerintah juga tengah mengupayakan berbagai langkah antisipasi menghadapi munculnya *strain* virus baru COVID-19, di antaranya dengan mendukung semua penelitian terkait SARS Cov-2 maupun COVID-19 termasuk pengembangan vaksin dan antivirus, hingga penguatan surveilans virologi.

“Pemerintah berkomitmen melakukan penguatan surveilans virologi agar dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal ini merupakan aspek penting untuk memetakan sebaran jenis virus yang tersebar di Indonesia,” jelas Prof. Wiku dalam agenda keterangan pers ‘COVID-19: Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Menuju 2021’ di Gedung BNPB, Kamis (31/12/2020).

Menurut Prof. Wiku, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, bersama 10 lembaga biologi molekuler lainnya berencana untuk melakukan lebih banyak pemetaan dan surveilans terhadap *genome* virus Sars Cov-2 dengan menggunakan metode *Whole Genome Sequencing* (WGS) terhadap sampel klinis dari berbagai daerah. Prosedur WGS digunakan sebagai upaya untuk melihat urutan kode genetika.



“

Pukul 9:42 WIB pagi ini, saya memulai ikhtiar besar sebagai warga negara Indonesia untuk terbebas dari pandemi dengan menerima vaksin COVID-19. Saya berharap vaksinasi COVID-19 yang tahapannya sudah dimulai hari ini berjalan dengan lancar.

Presiden Joko Widodo saat menerima suntikan vaksin pertama, Rabu (13/01/2020).

Dalam keterangan pers tersebut, Jubir Wiku turut mengedukasi masyarakat tentang cara kerja surveilans virologi. Ia menjelaskan *genome* atau materi genetika dari suatu organisme seperti virus, bakteri atau seorang manusia yang terdiri dari DNA. Untuk DNA ini, antar sesama organisme misalnya pada sesama virus Sars Cov-2, struktur DNA-nya bisa berubah atau berbeda. Sehingga dapat mempengaruhi kemampuan menginfeksi.

Pada umumnya terdapat 4 tahapan dalam proses WGS khususnya untuk mengidentifikasi virus COVID-19. Pertama, yaitu **DNA sharing** atau pemotongan DNA. Dalam tahapan ini dilakukan

pemotongan molekuler pada DNA virus menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, agar dapat dibaca oleh mesin pengurutan DNA. Kedua, **DNA barcoding** atau pengkodean DNA. Yaitu pemberian kode atau *tag*, atau bisa disebut juga memberi *barcode*, untuk mempermudah mengidentifikasi DNA virus.

Ketiga, **whole genome sequencing**, yaitu proses memasukkan DNA dari beberapa sampel virus ke dalam alat yang disebut *whole genome sequencer*. Alat ini akan menggunakan *barcode* untuk melacak asal kepemilikan DNA tersebut.

Keempat, **analisis data**, yaitu proses untuk membandingkan urutan DNA virus dan mengidentifikasi perbedaannya, karena banyaknya perbedaan ini dapat memberi informasi bagaimana tingkat kedekatan strain virus dan kemungkinan memiliki kekuatan untuk menimbulkan gejala yang sama pada manusia.

“*Whole genome sequencing* pada prinsipnya untuk memahami distribusi dan pola penyebaran virus dan memberi informasi mengenai karakteristik dari masing-masing isolat di tiap daerah, yang tentunya bermanfaat untuk penanggulangan dan pencegahan,” jelas Wiku.

Sumber: presidenri.go.id, COVID19.go.id

IFaS-Fest 2020

Ajang Kreatif Lahirkan Inovasi dan Karya Terbaik



Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS-Fest) 2020 menjadi tahun ketiga dalam penyelenggaraannya, dengan mengusung tema “Adaptasi Kebiasaan Baru”. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan para pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) untuk terus berinovasi dan berkarya pada IFaS-Fest 2020. Direktur Jenderal SDPPI Ismail mengatakan bahwa pada IFaS-Fest 2020 ini harus ada *adjustment*, karena tidak mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, karena di tengah Pandemi COVID-19, karya-karya yang dihasilkan justru semakin baik dan berbobot, tidak hanya dari sisi tampilan dan kemasannya, tapi juga dari substansinya,” kata Dirjen Ismail pada Puncak IFaS-Fest 2020 di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (10/12/20).

Dirjen Ismail berharap melalui IFaS-Fest Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen SDPPI dapat berkontribusi besar bagi kemajuan telekomunikasi di Indonesia. Sehingga tenaga muda SDPPI diharapkan dapat menimbulkan suatu konsep untuk berpikir dengan cara baru.

Semangat utama dari IFaSFest itu adalah komunikasi yang *bottom up* antara teman-teman pegawai dan pimpinan di Ditjen SDPPI.

“Keterlibatan staf-staf muda tidak di pusat saja, tapi banyak di daerah. Ini menjadi ajang kami untuk bisa bertemu di IFaSFest. IFaSFest juga membawa *culture creative* dan *innovation*. Ini yang kita hadapi teknologi. Teknologi yang berkembang sangat pesat ini hanya bisa diatur dengan orang-orang yang kreatif dan inovatif. Karena masyarakat itu bukan diatur, tapi diberikan kebebasan memanfaatkan teknologi. Agar kebebasan tidak terjadi interferensi. Bebas tapi tidak terjadi gangguan,” jelasnya.



SDPPI IDEA



KATEGORI SDPPI DATA CHALLENGE

Triple A - Balmon Kelas I Denpasar
Dashboard Manev Capaian Kinerja Balmon

Equator Spectrum Guard - Balmon Kelas II Pontianak
Sistem Informasi Data Microwave Klinik Operator di Wilayah Kalimantan Barat

Hectic Wednesday - Direktorat Pengendalian SDPPI
Big User Behaviour Dashboard Analysis di

KATEGORI IDEA & INNOVATION

Zulhaidir Hamid - Loka Gorontalo
MIND - SPER, Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio

Manuelson Asep, Ikra - Balmon Kelas I Makassar
Kontes Antena Amatir yang Tidak Melanggar Aturan sebagai Ajang Edukasi dan Pembinaan Bagi Amatir Radio

Fierza M, Anna C - Direktorat Penataan
Lights, Artificial Intelligence Spectrum Management

Ditambahkan Sekretaris Ditjen SDPPI R Susanto bahwa IFaS-Fest 2020 merupakan yang tersulit dibanding tahun-tahun sebelumnya .

Ini merupakan tahun ketiga IFaS-Fest, dan ini menjadi tahun tersulit yang kita rumuskan, karena kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Hasil dari itu semua kita dapat melaksanakan IFaS-Fest 2020 dengan cara online dan dapat diikuti oleh semua pegawai Ditjen SDPPI di seluruh Indonesia meskipun dengan cara dan metode yang berbeda.

“

IFastFest membawa *culture creative* dan *innovation*. Yang kita hadapi ini teknologi. Teknologi yang berkembang sangat pesat ini hanya bisa diatur dengan orang-orang yang kreatif dan inovatif.

”

Sebagai ajang kompetisi, IFaS-Fest bertujuan mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penggalan ide kreatif dan inovatif para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Ditjen SDPPI tersebut sekaligus sebagai bagian dari branding lembaga.

IFaS-Fest 2020 terbagi dalam tiga kelompok kompetisi. Pertama, SDPPIdea, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh ASN Ditjen SDPPI menyampaikan ide atau karya inovasi dan mendapatkan model/usulan/ide/karya inovasi yang memberikan manfaat bagi Ditjen SDPPI, negara, dan bangsa Indonesia. Ada dua kategori dalam SDPPI Idea, yaitu *Idea and Innovation* dan *SDPPI Data Challenge*.

Kelompok kedua, SDPPI Creator, yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pegawai Ditjen SDPPI dalam mem-*branding* institusinya melalui video dan foto. Ada dua kategori dalam SDPPI Creator, yaitu *Best Short Movie* dan *Best Impactful Photo*.

Kelompok kompetisi ketiga adalah SDPPI Choice Award, merupakan apresiasi terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang sudah melakukan kinerja pelayanan terbaik dan dapat menginspirasi UPT lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Ada enam kategori dalam SDPPI Choice Award, yaitu Administrasi Terbaik, Penindakan Hukum Terbaik, Pelayanan Publik Terbaik, Monitoring dan Penanganan Gangguan Terbaik, *Best Looking Office* dan Penyelenggaraan *Maritime on the Spot* (MOTS) Terbaik.



Ketua Pelaksana IFaS-Fest 2020 Aryo Pamoragung mengungkapkan bahwa hasil karya dari para peserta merupakan yang terbaik yang diberikan untuk setiap kategori. "Ide itu tidak pernah habis dan untuk IFaSFest 2020 ini, apresiasi dari hati saya yang terdalam dan terima kasih untuk teman-teman sudah melaksanakan ini dengan hati sehingga hasilnya pun terlihat, dan selamat untuk para juara dan teruslah berinovasi, meng-*upgrade* keahlian untuk menjadi lebih baik." ungkapnya.

Pemenang IFaS-Fest 2020

Berikut para pemenang IFaS-Fest 2020 yang telah berhasil menyalihkan para peserta lainnya:

SDPPIdea



Idea & Innovation

- 1) Zulfakhr Hamid (Loka Monitor SFR Gorontalo) :
MIMO-SFR: Penerimaan Menerimaan Kuatan dalam Kegiatan Monitoring Spektrum Relivensi Radio
- 2) Hanselton Jaka Jusef, Asap Rahayu Saputra, Ilra Zulfikar (Balai Monitor SFR Kelas I Makassar) :
Akses Akses Amate yang Tidak Melanggar Aturan Sebagai Ajang Edukasi dan Pembinaan Bagi Amate Radio
- 3) Farza Mutusahid Pasaribu, Aena Christia Sihombing (Direktorat Penataan Sumber Daya) :
Light, Artificial Intelligence Spectrum Management



SDPPI Data Challenge

- 1) Triple A (Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar)
- 2) Equator Spectrum Guard (Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak)
- 3) Hectic Wednesday (Direktorat Pengendalian SDPM)

SDPPI Creator



Best Short Movie

- 1) Balai Monitor SFR Kelas I Makassar
- 2) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya
- 3) Balai Monitor SFR Kelas II Mataram



Best Impactful Foto

- 1) Jermwoi (Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta) :
Zwajer Dan Rumah
- 2) Brian Fernando (Balai Monitor SFR Kelas I Medan) :
Day or Night
- 3) Herrian Robby (Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin) :
Pegunungan Relivensi Radio di Wukala Aziz Jempang Lok Baintan

SDPPI Choice Award



Administrasi Terbaik

- 1) Balai Monitor SFR Kelas II Mataram
- 2) Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin
- 3) Balai Monitor SFR Kelas I Medan



Monitoring dan Penanganan Terbaik

- 1) Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta
- 2) Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak
- 3) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya



Penindakan Hukum Terbaik

- 1) Balai Monitor SFR Kelas I Semarang
- 2) Balai Monitor SFR Kelas II Aceh
- 3) Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar



Pelayanan Publik Terbaik

- 1) Balai Monitor SFR Kelas II Lampung
- 2) Loka Monitor SFR Gorontalo
- 3) Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin



Penyelenggara MOTS Terbaik

- 1) Balai Monitor SFR Kelas II Manado
- 2) Balai Monitor SFR Kelas I Makassar
- 3) Loka Monitor SFR Ambon



Best Looking Office

- 1) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya
- 2) Loka Monitor SFR Pangkal Pinang
- 3) Loka Monitor SFR Ternate



Kolaborasi ASEAN untuk Transformasi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri 1st ASEAN Digital Minister's Meeting (ADGMIN), pertemuan perdana kementerian telekomunikasi negara anggota ASEAN yang berlangsung secara daring mulai tanggal 18 s.d. 22 Januari 2021.

ADGMIN merupakan forum pertemuan para Menteri yang membidangi TIK dan digital dari 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam).

Sebagai pemeran kunci dalam digital ekonomi dan transformasi digital di ASEAN, ADGMIN bertugas untuk melakukan koordinasi lintas pilar dan sektoral, serta kerjasama dengan swasta dan pelaku industri. Sebelumnya, forum ini dikenal dengan nama ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN). Perubahan ini disepakati pada TELMIN ke-18 pada tahun 2019 yang saat itu diketuai oleh Indonesia.

Dalam pidatonya, Menteri Johnny menekankan pentingnya aspek keamanan dan kedaulatan data, tata kelola data (*data governance*), serta kerja sama dan diskusi terkait pertukaran data lintas batas negara (*cross border data flow*) yang memenuhi prinsip *reciprocity, lawfulness, fairness, dan transparency*.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo menyatakan krisis sekarang ini perlu menjadi momentum untuk percepatan transformasi digital. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam membantu pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, Menteri Johnny menegaskan perlunya semangat kolaborasi di antara negara ASEAN.

"Kami percaya semangat kolaborasi di ASEAN harus fokus untuk mengatasi pandemi. Manfaat digitalisasi juga harus dimaksimalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Upaya harus dilakukan untuk

membantu yang paling rentan dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," tegasnya.

Selain itu, hal yang perlu dikembangkan, menurut Menteri Kominfo adalah optimisme dan kebersamaan untuk membangun komunitas digital ASEAN.

"Penting juga bagi kita untuk mempertahankan optimisme selama masa sulit ini. Bersamaan kita akan bangkit kembali lebih kuat dan bergerak menuju ASEAN sebagai komunitas yang terhubung secara digital," pungkasnya.

Mengangkat tema "ASEAN: a Digitally-Connected Community", pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia ini bertujuan untuk membentuk kembali lansekap digital pasca pandemi COVID-19 dengan mengadopsi ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM2025).

Pertemuan ini menghasilkan beberapa *outcome* penting, yang

utama adalah peluncuran ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM 2025) dan Deklarasi Putrajaya.

Dokumen ADM 2025 memuat visi ASEAN untuk mewujudkan ekonomi digital dan masyarakat digital. Visi ini perlu ditunjang oleh konektivitas yang merata di seluruh ASEAN, regulasi yang mendukung inovasi dan pengembangan layanan *e-government*, serta literasi dan keterampilan digital yang mumpuni. Untuk mencapai visi tersebut, negara-negara ASEAN telah menyepakati 8 (delapan) sasaran (*desired outcomes*) pengembangan sektor digital untuk diimplementasikan hingga tahun 2025 nanti. Adapun 8 sasaran tersebut adalah:

- ◆ Langkah-langkah perwujudan ADM 2025 diprioritaskan untuk pemulihan negara-negara ASEAN dari pandemi COVID-19;
- ◆ Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur *fixed* dan *mobile broadband*;
- ◆ Penyediaan layanan digital yang aman dengan pencegahan kerugian masyarakat;
- ◆ Pasar yang kompetitif dan berkelanjutan yang mendukung penyediaan layanan digital;
- ◆ Peningkatan kualitas dan penggunaan layanan *e-government*;
- ◆ Penyediaan layanan digital untuk menghubungkan bisnis dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- ◆ Peningkatan kapabilitas untuk bisnis dan masyarakat demi mendorong partisipasi di ekonomi digital;
- ◆ Masyarakat digital yang inklusif di ASEAN.

Adapun, Deklarasi Putrajaya berisi 6 (enam) butir komitmen negara-negara ASEAN untuk mendorong implementasi ADM 2025 serta adopsi Pedoman Implementasi ASEAN Data Management Framework (ADMF) dan ASEAN Model Contractual Clauses for Cross Border Data Flows (AMCC). Deklarasi Putrajaya juga merangkum kesepakatan untuk meneruskan kerja sama sektor digital para Menteri Digital ASEAN dengan negara-negara mitra dialog, terutama untuk membantu implementasi ADM 2025.

Rangkaian ADGMIN

Pada pertemuan ini Menteri Kominfo menghadiri seluruh rangkaian aktivitas, mulai dari ADGMIN+US, ADGMIN+China, ADGMIN+Japan, ADGMIN+ROK, ADGMIN+India, dan ADGMIN+ITU. Seluruh pertemuan menekankan kolaborasi rencana kerja antara ASEAN dengan masing-masing negara.

Dalam sesi ADGMIN+Japan, Menteri Kominfo menyatakan pentingnya kerja sama dalam infrastruktur digital, termasuk

penyebaran 5G di seluruh Indonesia; keamanan ruang digital yang menopang keamanan dan keandalan data serta infrastruktur distribusi dan komunikasi; serta pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan, termasuk pengelolaan COVID-19 dan vaksinasi.

Selanjutnya, pada sesi ADGMIN+Republik Korea, Menteri Kominfo menggarisbawahi kerja sama antara ASEAN dan Republik Korea di bidang teknologi baru seperti 5G, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), serta open data. Selain itu, kerangka regulasi antarnegara yang berkolaborasi perlu dipertimbangkan dalam implementasi open data.

“Kami mencatat bahwa prioritas dalam rencana kerja sama ASEAN-Korea di bidang TIK akan sangat relevan dengan program strategis Indonesia di bidang transformasi digital, termasuk pengembangan Pusat Data Nasional dan pengembangan 5G. Kedua program tersebut akan mulai dikembangkan tahun ini,” paparnya.

Sementara dalam sesi ADGMIN+ITU, Menteri Kominfo menegaskan pentingnya kolaborasi ASEAN-ITU dalam mempromosikan standarisasi dan tata kelola telekomunikasi yang lebih inklusif dan mencakup semua kawasan. Selain itu, Menteri Johnny juga menyatakan pentingnya memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan data untuk memastikan adopsi teknologi yang lebih cerdas dan berkelanjutan di semua sektor.



Optimasi TIK untuk Tangani Pandemi

Dalam pertemuan 1st ADGMIN, Kamis (21/01/2021), Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal guna menangani dampak pandemi COVID-19.

Menurut Menteri Kominfo, selain untuk mendukung pemulihan sektor kesehatan dan vaksinasi, di Indonesia TIK digunakan untuk memulihkan ekonomi nasional dengan fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengembangan startup digital.

"Proses transformasi digital juga terlihat dalam penanganan pandemi bangsa, karena Indonesia secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital sejak awal pandemi," paparnya dari Jakarta, Kamis (21/01/2021).

Menteri Johnny menyatakan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan *platform tracking-tracing-fencing* PeduliLindungi dan mendukung pengembangan platform informasi satu atap "Bersatu Lawan COVID-19" atau "United Against COVID-19".

"Upaya tersebut berkontribusi pada sosialisasi program Pemerintah untuk mengajak masyarakat mengikuti aturan wajib kesehatan," jelasnya.

Dalam proses Vaksinasi COVID-19, Menteri Kominfo menunjukkan teknologi digital berperan penting dalam melaksanakan secara efisien, karena terdapat sekitar 181,5 juta penerima dari total 270 juta penduduk Indonesia

"Baru-baru ini, kami juga melihat cahaya di ujung terowongan dengan datangnya vaksin. Indonesia sudah memulai putaran pertama vaksinasi minggu lalu, dimulai dengan Presiden, Bapak Joko Widodo menyoroti peran vaksin sebagai *game changer* selama pandemi," paparnya.

Menteri Johnny menjelaskan, Pemerintah Indonesia memanfaatkan "Satu Data Vaksin COVID-19" yang komprehensif sebagai platform terintegrasi untuk menangani pengelolaan vaksinasi "One Data Digital System for Vaccination, sebagai platform terintegrasi untuk menangani pengelolaan vaksinasi, mulai dari pendaftaran vaksin, pendistribusian vaksin, hingga penerbitan sertifikat bagi penerima," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan jaringan internet untuk 3.000 fasilitas kesehatan pada tahun 2020, lebih dari 13.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

"Dan menjadikan semua fasilitas tersebut dapat beroperasi penuh untuk vaksinasi dan tindakan telemedis lainnya untuk tahun ini dan seterusnya," papar Menteri Kominfo.

Agenda keenam pertemuan Menteri Digital anggota ASEAN ini membahas mengenai pertukaran pandangan dalam pembangunan TIK di masing-masing negara anggota ASEAN. Dipandu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, acara itu diikuti oleh Menteri Digital Negara Anggota ASEAN, dan Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Ekonomi ASEAN, Aladdin D. Rillo.

● Percepatan Transformasi Digital

Menteri Johnny menyatakan pandemi COVID-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia dan ASEAN.

"Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi digitalnya melalui inisiatif transformasi digital di sektor-sektor strategis, yaitu pembangunan infrastruktur, adopsi teknologi, peningkatan talenta digital, dan pembuatan regulasi fundamental," paparnya.

Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia saat ini menargetkan jangkauan internet yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tangguh, untuk lebih meningkatkan rasio tautan internet dan menutup kesenjangan digital.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia bekerja sama dengan penyedia telekomunikasi untuk menggelar infrastruktur konektivitas digital. Untuk dua tahun ke depan, MTBS akan menempatkan ribuan BTS baru untuk memenuhi konektivitas broadband di seluruh Indonesia, dan peluncuran High Throughput Satellite SATRIA-1 pada tahun 2023. Dengan kapasitas 150 Gbps per detik, Satelit tersebut diharapkan dapat menghasilkan konektivitas yang andal di seluruh pelosok Indonesia," paparnya.

Menurut Menteri Johnny upaya penyediaan infrastruktur digital akan dapat memperkuat upaya transformasi digital. Selain tata kelola data, keamanan siber, serta kerangka kerja khusus pada aliran data lintas batas, terkait dengan perlindungan data pribadi.

"Kami percaya bahwa konektivitas yang kuat merupakan prasyarat transformasi digital untuk memperkuat kapasitas perekonomian nasional Indonesia. Dalam melakukan inisiatif kemajuan ekonomi tersebut dan mencatat nilai ekonomi yang signifikan dari data di era ini, kami juga menggarisbawahi perlunya memperhatikan tata kelola data, keamanan siber, serta kerangka kerja khusus pada aliran data lintas batas, terkait dengan perlindungan data pribadi," tuturnya.

● Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Startup Digital

Dalam bidang ekonomi, Menteri Kominfo menjelaskan Pemerintah Indonesia telah menyaksikan bagaimana digitalisasi telah memberdayakan UMKM.

"Terutama bisnis ultra mikro, untuk tetap produktif dan bertahan selama pandemi," tandasnya.

Menteri Johnny memaparkan data pada paruh kedua tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi 3,4 juta UMKM. Pada tahun 2024, diharapkan ada lebih dari 30 juta UMKM dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang go digital.

"Dalam bentuk digital *onboarding* melalui program unggulan kami: "Bangga Buatan Indonesia" yang menghasilkan lebih dari 10 juta UMKM *onboarding* secara digital," paparnya.

Menteri Kominfo menyatakan UMKM bukan satu-satunya pilar ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara kelima di dunia dengan jumlah startup terbanyak, dengan total lebih

dari 2000 startup, 4 Unicorn, dan 1 Decacorn.

"Kami terus berupaya untuk memelihara lingkungan digital yang lebih baik melalui peraturan dan program yang lebih baik yang memfasilitasi bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Di antara program prioritas kami Gerakan 1000 Startup Digital, inkubator dan akselerator untuk Startup Indonesia, dan NextlCorn, fasilitator yang bertugas menjembatani para startup dan investor untuk membina unicorn Indonesia berikutnya," ungkapinya.

Selain Menteri Johnny G. Plate, pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputy Secretary General ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat, Aladdin D. Rillo; Menteri Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam Dato Abdul Mutalib Yusof; dan Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja Vandeth Chea.

Hadir pula Wakil Menteri Pos dan Telekomunikasi Laos PDR Bounsaleumsay Khennavong; Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Dato 'Saifuddin Abdullah; Menteri Perhubungan dan Komunikasi Myanmar, Thant Sin Maung; dan Sekretaris Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Filipina, Gregorio B. Honasan II

Dari Singapura hadir Menteri Komunikasi dan Informasi, S Iswaran, hadir pula dalam pertemuan virtual Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand, Buddhpongse Punnakanta; dan Menteri Komunikasi dan Informasi Vietnam, Nguyen Manh Hung.

Sementara sebagai mitra dialog, hadir Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Liehong Liu; Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Masayoshi Shintani; Menteri Sains dan TIK Republik Korea, Choi Ki Young.

Hadir pula Menteri Negara Komunikasi, Elektronika & Teknologi Informasi Departemen Telekomunikasi India, Dhotre Sanjay Shamrao; Komisaris Komisi Komunikasi Federal A.S. Amerika Serikat (A.S.), Geoffrey Starks serta Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Houlin Zhao.



Pertemuan ADGSOM 2021, Sekjen Kominfo Tekankan Pelindungan Data WNI

Pemerintah Indonesia menekankan pelindungan data pribadi warga negara Indonesia dalam ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM2025). Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan hal itu menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengadopsi kesepakatan dalam ADM2025.

"Indonesia telah secara intensif mengikuti pembahasan dan *working group* tata kelola data digital selama tahun 2020. Kami menyadari bahwa kerangka tata kelola

data sangat penting untuk melindungi data Warga Negara Indonesia (WNI) secara efektif, apabila data itu mengalir melintasi batas wilayah," ujarnya saat menghadiri pertemuan virtual "1st ASEAN Digital Senior Official Meeting (ADGSOM) and Related Meetings", dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta (19/01/2021).

Dalam pertemuan itu, Sekjen Mira mendorong kolaborasi untuk penguatan tata kelola data antarnegara anggota ASEAN. Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, dalam draft akhir tersebut dikatakan bahwa tugas utama ADGSOM adalah untuk mempercepat transformasi digital di Kawasan ASEAN. "Oleh karena itu, Indonesia menyatakan dukungan terhadap pedoman pengesahan adopsi pada pelaksanaan ADGMIN nantinya," tuturnya.

Sekjen Mira menyatakan berbagai masukan dalam dokumen Masterplan ASEAN Digital 2025 telah dipertimbangkan Pemerintah Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih perlu diklarifikasi, Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, seluruh negara di ASEAN perlu menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang kuat dengan berbagai mitra dan badan sektoral lain.

"Kami setuju dengan agenda yang akan dibahas. Kepemimpinan Chairmanship Malaysia dapat mengarahkan kami pada

awal implementasi inisiatif dan kerja sama baru yang akan didukung oleh para menteri. Namun, Indonesia belum dapat segera mengadopsi, menerapkan kerangka kerja pengelolaan data, dan model klausul kontrak yang tertuang dalam Masterplan Digital ASEAN dikarenakan untuk melindungi data pribadi WNI," tegasnya.

Apresiasi Draft Masterplan

Sekjen Kementerian Kominfo menyampaikan Indonesia memberi apresiasi yang tinggi kepada kepengurusan ADGSOM 2020 yang telah beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara. Sekjen Mira memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Malaysia sebagai penyelenggara ADGSOM 2021 yang telah menyelesaikan masterplan digital ASEAN dalam waktu yang sangat terbatas.

"Kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyambut kepemimpinan ADGSOM Chairmanship Malaysia, serta Myanmar sebagai Wakil Ketua. Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia yang telah memasukkan usulan kami pada draf akhir Masterplan Digital ASEAN 2025. Terima kasih atas upaya seluruh delegasi yang secara aktif memberikan masukan dalam diskusi," tuturnya.

Dalam pertemuan bertajuk ASEAN A Digitally Connected Community itu, Sekjen Mira memperkenalkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang baru dilantik oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Ia mengapresiasi pelaksanaan ADGSOM yang berlangsung dalam waktu dan situasi sangat terbatas.

"ADGSOM telah berhasil mewujudkan transformasi digital nyata dari pertemuan fisik TELSOM menjadi pertemuan virtual. Bahkan, telah memenuhi siklus dunia secara tepat waktu dan menyampaikan banyak dokumen penting," ungkapnya.

Dalam pertemuan perdana ADGSOM ini, hadir Sekjen International Telecommunication Union (ITU), Houlin Zhao; Asisten Direktur Divisi TIK dan Pariwisata Sekretariat ASEAN, Le Quang Lan; Sekjen Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Dato 'Sri Mohammad Mentek; Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi Brunei Darussalam, Hairul Mohd Daud Abdul Karim; Direktur Jenderal Departemen Umum Telekomunikasi Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja, Gnak Tol; Wakil Direktur Jenderal Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Pos dan Telekomunikasi Laos, Phavanha Douangboupha; Sekretaris Tetap Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar, Soe Thein; Wakil Menteri Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Filipina, Alan Silor.

Ada pula Direktur Jenderal Otoritas Pengembangan Media Infocomm Singapura, Leong Keng Thai; Inspektur Jenderal Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand, Piyanuch Wuttisorn; Direktur Departemen Kerjasama Internasional Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam, Trieu Minh Long; Mitra Dialog China, LU Jianwen.



ADGSOM telah berhasil mewujudkan transformasi digital nyata dari pertemuan fisik TELSOM menjadi pertemuan virtual. Bahkan, telah memenuhi siklus dunia secara tepat waktu dan menyampaikan banyak dokumen penting



Hadir juga Wakil Direktur Jenderal Departemen Kerjasama Internasional Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi; Wakil Menteri Koordinasi Kebijakan (Hubungan Internasional) Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Mabito Yoshida; Direktur Divisi Kerja Sama Multilateral Kementerian Sains dan TIK Republik Korea, Choi Sung Joon; Direktur Jenderal (Telekomunikasi) Departemen Telekomunikasi India, Tushar Kanti Paul; Wakil Asisten Sekretaris untuk Komunikasi Internasional dan Kebijakan Informasi Departemen Luar Negeri AS, Stephen Anderson; serta Administrator Utama Direktorat Jenderal Urusan Internasional untuk Jaringan Komunikasi, Konten dan Teknologi Uni Eropa, Petri Koistinen.

Dorong Tata Kelola, Standardisasi Telekomunikasi dan Pelindungan Data Pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong tata kelola dan standardisasi telekomunikasi yang lebih inklusif dan menyeluruh di regional ASEAN.

“Tata Kelola telekomunikasi yang inklusif tentunya akan mendorong percepatan penggelaran infrastruktur jaringan 4G dan 5G untuk meningkatkan konektivitas

nasional di masing-masing negara ASEAN,” tegasnya melalui Sesi Dialog Virtual Menteri Digital ASEAN dengan International Telecommunication Union (ITU) dalam 1st ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN), dari Jakarta, Jumat (22/01/21).

Selain itu, Menteri Kominfo menyatakan pentingnya

pelindungan data pribadi dan keamanan data. “Data sekarang memiliki nilai ekonomi yang signifikan sehingga perlu dikelola dan digunakan dengan menjunjung prinsip kedaulatan data, yakni *a reciprocal, lawful, fair, and transparent manner*,” tuturnya.

Menteri Johnny mengapresiasi peran ITU sebagai mitra ASEAN yang membantu percepatan transformasi digital di kawasan ASEAN. Selanjutnya, Menteri Johnny mengharapkan pertukaran praktik terbaik dan pengetahuan praktis melalui platform kolaborasi ASEAN-ITU yang diyakini bukan hanya akan memperkuat kerja sama Indonesia dengan ITU, tetapi juga mendukung realisasi ASEAN yang terkoneksi secara digital.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ITU Houlin Zhao, para menteri digital ASEAN juga mengapresiasi ITU yang memberikan dukungan terus-menerus kepada ASEAN antara lain dalam pengembangan kota pintar berkelanjutan (*smart sustainable cities*) dan ekosistem 5G.



Menteri Digital ASEAN Sepakati Kerangka Kerja Sama dengan Tiga Mitra

Menteri Digital ASEAN menyetujui kerangka kerja sama bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan tiga mitra strategis ASEAN, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok dan India.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dukungan dan peran tiga negara mitra strategis itu diperlukan dalam implementasi ASEAN Digital Masterplan 2025 yang diluncurkan pada hari ini.

"United States-ASEAN Business Council atau US-ABC menyampaikan pandangannya terhadap tren ekonomi digital selama pandemi dan para Menteri ASEAN sepakat mengadopsi 2021 ASEAN-US ICT Work Plan," ungkapnya usai dialog virtual bersama para menteri digital ASEAN dengan perwakilan Amerika Serikat, Tiongkok dan India dalam rangkaian 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) dari Jakarta, Jumat (22/01/2021)

Menurut Menteri Johnny, kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama untuk mempercepat implementasi

inisiatif-inisiatif ASEAN dan Amerika Serikat dalam kerangka pengembangan teknologi digital.

"Di mana di dalamnya termasuk program USAID's ASEAN Ignite dan program implementasi yang dapat mempercepat implementasi inisiatif-inisiatif ASEAN-US," tegasnya.

Mengenai Kemitraan Strategis ASEAN-Tiongkok, Menteri Kominfo menyatakan lingkup kerja sama di bidang digital



mencakup beberapa isu dan platform teknologi, termasuk pengembangan *smart city* dan transformasi digital.

"Kemitraan Strategis ASEAN-Tiongkok sangat erat di bidang digital. Kami berdiskusi tentang beragam isu, termasuk penggunaan teknologi selama pandemi, *deployment* 5G, *Artificial Intelligence*, industrial internet, keamanan siber, *smart city*, dan transformasi digital," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, para menteri digital ASEAN sepakat terus melanjutkan kemitraan dengan Tiongkok dilanjutkan dengan mengacu kesuksesan 2020 ASEAN-China Year of Digital Economy Cooperation.

Dengan India, Menteri Kominfo menegaskan para menteri digital ASEAN mengadopsi 2021 ASEAN-India ICT Work Plan yang dapat mendukung implementasi dari ASEAN Digital Masterplan 2025.

"Termasuk pembentukan National Knowledge Network, *capacity building* dan *knowledge sharing* di bidang Internet of Things (IoT) dan 5G, TIK dalam penanganan bencana alam, dan lainnya," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, para menteri Digital mengapresiasi tiga negara mitra strategis ASEAN. "Para Menteri ASEAN menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan India yang terjalin di bawah kemitraan strategis ASEAN-AS, ASEAN-China dan ASEAN-India," ungkapnya.

Pertemuan dilakukan dengan Komisaris Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat, Geoffrey Starks; Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi China, Liehong Liu; dan Menteri Negara Komunikasi, Elektronika & Teknologi Informasi Departemen Telekomunikasi India, Dhotre Sanjay Shamrao.



Jajaki Kerja Sama Teknologi Terbaru dengan Korea Selatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan peluang kerja sama pengembangan teknologi terbaru antara ASEAN dan Korea Selatan.

"Kami menantikan dukungan dan kerja sama Republik Korea yang berkelanjutan dengan ASEAN di bidang teknologi baru, seperti 5G, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), serta data terbuka atau open data," ujarnya pada Sesi Dialog Virtual Menteri Digital ASEAN dengan Menteri Sains dan TIK Republik Korea, Choi Ki Young dalam 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN), dari Jakarta, Jumat (22/01/21).

Menurut Menteri Kominfo, kerja sama itu akan memungkinkan integrasi dan berbagi pengetahuan di antara negara ASEAN. "Inisiatif ini penting untuk menghasilkan integrasi data, jaringan (network), dan kecerdasan buatan (AI) atau yang disingkat DNA yang lebih kuat dan akan sangat berkontribusi pada proses berbagi pengetahuan di kawasan ASEAN dan lintas batas," jelasnya.

Bahkan, Menteri Johnny menilai ASEAN-Korea ICT Cooperation Plan

yang telah diadopsi dalam pertemuan ADGMIN sangat relevan dengan program-program strategis Indonesia di bidang transformasi digital.

"Termasuk pembangunan Pusat Data Nasional dan deployment 5G yang akan dimulai tahun ini," tuturnya.

Menurut Menteri Kominfo, para Menteri ASEAN menyampaikan apresiasinya kepada Korea Selatan untuk dukungannya sepanjang tahun 2020 dalam hal pembangunan kapasitas digital ASEAN. "Menteri Digital ASEAN memberikan penghargaan yang tulus kepada Republik Korea atas kontribusinya terhadap pengembangan kapasitas digital ASEAN, melalui peningkatan konektivitas,

pengembangan sumber daya manusia, dan keamanan informasi sepanjang tahun 2020," ungkapnya.

Meskipun demikian, Menteri Johnny menekankan pentingnya aliran data lintas batas dalam proses yang terbuka dan memperhatikan regulasi yang dianut masing-masing negara.

"Cross border data flow dalam kerangka implementasi open data dan integrasi Data, Network, dan AI (DNA) harus dilakukan dengan memperhatikan kerangka regulasi masing-masing negara yang berkolaborasi," tandasnya.

Sebagai penutup, Menteri Johnny mengungkapkan, "Saya berharap kerjasama yang baik antara ASEAN dan Korea Selatan dapat terus terjalin lebih erat di masa mendatang".

Dukungan Indonesia untuk Ekosistem Digital yang Aman dan Transformatif

Menteri Digital ASEAN mengadopsi 2021 ASEAN-Japan ICT Work Plan yang dapat berkontribusi pada tercapainya program prioritas di bawah ASEAN Digital Masterplan 2025. Dalam aspek implementasi teknologi 5G, keamanan siber dan pemanfaatan teknologi untuk kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan aspek keamanan dan kedaulatan data.

"Arahnya menuju pembangunan komunitas digital dan blok ekonomi, yang kekuatannya bertopang pada pelayanan teknologi, dan ekosistem yang aman dan

transformatif," tuturnya usai Sesi Dialog Virtual Menteri Digital ASEAN dengan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Masayoshi Shintani dalam 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN), dari Jakarta, Jumat (22/01/2021).

Menteri Johnny menegaskan pentingnya Masterplan Digital

ASEAN 2025 untuk memandu jalan menuju masyarakat digital ASEAN. Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengusulkan Rencana Kerja TIK ASEAN-Jepang selaras dengan prioritas nasional Indonesia.

"Pertama, membangun infrastruktur digital 4G di seluruh Indonesia dan penyebaran awal jaringan 5G. Kedua, menjunjung tinggi keamanan siber yang menopang keamanan dan keandalan data serta infrastruktur digital. Dan ketiga memanfaatkan teknologi digital di bidang kesehatan, termasuk pengelolaan COVID-19 dan vaksinasi," ungkapnya.

Menteri Johnny meyakini konektivitas yang kuat merupakan prasyarat transformasi digital untuk memperkuat kapasitas ekonomi di kawasan ASEAN. Adapun dalam pengelolaan data yang memiliki nilai ekonomis signifikan, diperlukan kerangka yang disepakati bersama.



"Saya ingin menegaskan kembali bahwa data memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang harus didukung oleh kerangka khusus tentang arus data lintas batas. Lebih penting lagi, penghormatan terhadap perlindungan data pribadi, serta prinsip *resiprokal, fairness, lawfulness*, dan *transparency* merupakan hal mendasar dalam setiap *platform* kerja sama," tandasnya.

Bersama para Menteri Digital ASEAN, Menteri Kominfo mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Jepang dalam berbagai sektor kerja sama. "Termasuk pengembangan 5G, pengembangan Guideline and Common Standard of smart Notification System for Natural Disaster, serta ASEAN-Japan Symposium on ADM 2025," ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, para Menteri Digital ASEAN juga mengapresiasi kerja sama praktis yang tertuang dalam program pelatihan untuk keamanan siber. "Saya menyampaikan penghargaan yang tulus atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama dan berkelanjutan antara ASEAN dan Jepang. Hal yang menggembirakan mengingat bahwa ASEAN dan Jepang telah mencapai banyak prestasi, terutama di bidang digital," tuturnya.

Ke depan, Menteri Kominfo mengharapkan kerja sama ASEAN dan Jepang semakin terjalin dengan baik. "Saya berharap kerjasama antara ASEAN dan Jepang terus terjalin dengan baik, dan bersama-sama kita dapat membangun masyarakat digital yang aman, inklusif dan transformatif," harapnya.



Bertemu Menteri Komunikasi Singapura, Menteri Kominfo Tekankan Penguatan Kerja Sama Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, S. Iswaran pada

Kamis (21/01/2021) yang lalu. Audiensi ini dilakukan di sela-sela Pertemuan Menteri Digital ASEAN atau ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN) yang berlangsung secara virtual pada 21-22 Januari 2021.

Menteri Iswaran secara khusus mengundang Menteri Johnny untuk membahas agenda penguatan kerja sama bilateral

antara kedua negara. Sejak tahun 2007, Indonesia dan Singapura telah memiliki Nota Kesepahaman kerja sama di bidang telekomunikasi dan informatika. Tahun 2020 kemarin, telah dilakukan peninjauan awal untuk pembaharuan Nota Kesepahaman tersebut agar lebih relevan dengan perkembangan digital terkini, termasuk perlindungan dan kedaulatan data.

"Indonesia menghargai dan amat terbuka dengan prakarsa peningkatan kerja sama ini. Nota Kesepahaman ini juga diharapkan dapat merefleksikan prinsip-prinsip nasional Indonesia terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang akan tercakup dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," tutur Menteri Johnny di Jakarta, Sabtu (23/01/2020).

Selain perlindungan data, isu pertukaran data lintas batas negara (*cross-border data flow*) juga semakin krusial untuk dibahas secara komprehensif, mengingat pertukaran data ini dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi yang lebih masif. Sebagai

Tingkatkan Konektivitas Digital

gambaran, menurut Menteri Koinfo, kebijakan yang lebih pasti terkait pertukaran data lintas batas negara akan mendukung ekspansi perusahaan dan Indonesia ke negara ASEAN lainnya.

"Karenanya, kita perlu membahas kerangka atau protokol kerja sama pertukaran data ini yang lebih konkret, yang menjunjung tinggi prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency* dan juga prinsip *reciprocity*," tegas Menteri Johnny.

Nota Kesepahaman antara Singapura dan Indonesia juga akan mencakup kerja sama pengembangan talenta digital di dua negara. Sama halnya dengan Indonesia, Singapura juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan teknis digital, seperti pemahaman mengenai *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet-of-Things* (IoT), karena dibutuhkan industri sekarang. "Menteri Iswaran juga memberikan apresiasi atas inisiatif pengembangan talenta digital yang sangat menyeluruh, mulai dari keterampilan tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan," tutur Menteri Koinfo.

Ke depannya, Nota Kesepahaman antara Singapura dan Indonesia akan dibahas lebih lanjut secara internal Kementerian Koinfo dan juga dengan Kementerian/ Lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Luar Negeri.

Di samping isu perlindungan data dan talenta digital, Singapura juga memberikan perhatian khusus terhadap progres penggelaran jaringan 5G di Indonesia. "Kami berharap dapat terjadi pertukaran pengalaman dan best-practices antara Indonesia dan Singapura untuk mempercepat implementasi 5G di dua negara," jelas Menteri Iswaran. Singapura menargetkan seluruh wilayah negaranya akan terjangkau jaringan 5G sampai dengan tahun 2025.

Indonesia sendiri merencanakan showcasing jaringan 5G di beberapa fasilitas publik strategis di tahun 2021 ini. Menteri Koinfo mendorong para operator seluler untuk segera mengembangkan opsi teknologi dan skema layanan 5G di Indonesia," tegas Menteri Johnny.

Menurut Menteri Koinfo, keberadaan jaringan 5G ini akan semakin memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas nasional dalam rencana besar transformasi digital. Dalam dua tahun ke depan, Kementerian Koinfo bekerja sama dengan operator seluler untuk menghadirkan jaringan 4G di seluruh desa/wilayah di Indonesia.

Audiensi bilateral tersebut ditutup dengan kesepakatan dari dua Menteri untuk saling mengkoordinasikan hasil pembicaraan di tingkat teknis. "Hubungan bilateral Singapura dan Indonesia selama ini amat baik dan erat. Semoga dalam waktu dekat kita dapat segera memulai inisiatif program sesuai rencana," tutur Menteri Johnny.

Turut mendampingi juga dalam audiensi tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Koinfo Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal

Aplikasi Informatika Kementerian Koinfo Samuel Pangerapan. Adapun dari Singapura, Menteri Iswaran didampingi oleh Senior Advisor Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura Karen Tan dan Assistant Chief Executive Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapura Foo Chi Hsia.



Karenanya, kita perlu membahas kerangka atau protokol kerja sama pertukaran data ini yang lebih konkret, yang menjunjung tinggi prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency* dan juga prinsip *reciprocity*





Ambulans datang silih berganti membawa peti jenazah yang telah terbungkus plastik. Hingga Rabu (20/1/2021) tercatat 939.948 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan angka kematian mencapai 26.857 jiwa akibat COVID-19, di mana jumlah pasien yang sembuh masih di bawah angka pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam sehari.

Foto dan Teks : Indra Kusuma











Pengetahuan masyarakat tentang protokol kesehatan (prokes) semakin meningkat. Hanya saja kepatuhan masyarakat terkait 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta menjaga jarak) masih sangat kurang.

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, baru satu pekan digunakan sebagai tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19 menyusul lahan makam di TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur untuk COVID-19 di blok Muslim dinyatakan penuh, TPU Srengseng Sawah yang seharusnya bisa menerima hingga 40 jenazah korban COVID-19, dikabarkan lahan yang tersedia kapasitasnya sudah hampir penuh.





Pemerintah Indonesia telah mendatangkan vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12/2020). Kluster berikutnya akan datang di awal tahun sebanyak 1,8 juta dosis sehingga totalnya mencapai 3 juta dosis, dari total sebanyak 116 juta dosis Sinovac di tahun 2021.

Mayoritas penduduk perlu mendapatkan vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity). Sehingga kita berharap pandemi dapat segera berlalu dan kehidupan dapat kembali normal.



BAKTI untuk Fasyankes, Semangat Juang Nakes untuk Negeri

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menjadi partner para tenaga kesehatan (nakes) dalam memenuhi kebutuhan akses internet. Berangkat dengan slogan **BAKTI untuk Negeri**, BAKTI Kominfo berkejaran dengan waktu menyediakan infrastruktur digital untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) khususnya Puskesmas di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo, Anang Latif mengatakan bahwa dalam menghadapi situasi, tantangan dan ancaman dari pandemi COVID-19, penyelesaian infrastruktur akses internet untuk fasyankes menjadi perhatian utama. Pemerintah secara sungguh-sungguh bertekad menghadirkan komitmen tersebut. Sebab, ada ratusan ribu nakes dan ribuan fasyankes terkhusus di wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T) yang membutuhkan keadilan dan perhatian negara.

“Karena dari 13.011 fasyankes masih menyisakan 3.126 titik layanan kesehatan yang belum ter-cover akses internet. Tentunya tanpa jaringan internet ini integrasi data khususnya data COVID-19 belum bisa secara agregasi nasional secara lengkap. Ada tersisa dari fasyankes tersebut,” kata Dirut BAKTI di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Tekad dan komitmen BAKTI Kominfo menyediakan infrastruktur akses internet kepada fasyankes memang tidak mudah, apalagi menghubungkan banyaknya pulau di Indonesia. Tidak saja itu, masih banyak persoalan lain yang kemudian memiliki keterkaitan dengan penyediaan infrastruktur digital, misalnya persoalan data pribadi yang sangat penting

untuk dijaga. Selama pandemi ini pun upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi pasien COVID-19 seringkali menjadi sorotan.

Oleh karena itu Dirut BAKTI Kominfo berharap, ketika titik-titik layanan kesehatan dapat terjangkau dengan internet secara keseluruhan pada kuartal I tahun 2021 ini, data pasien Indonesia bisa kemudian terintegrasi ke pemerintah pusat. “Ketika semua data pasien terintegrasi maka kita tidak perlu lagi khawatir akan data pribadi yang telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Ini hanya salah satu contoh akselerasi program dan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Salah satu akselerasi program dan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari kerja sama antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan memiliki sebuah program yang dinamakan *Telemedicine* dan *Telehealth*. Namun program tersebut tentunya tidak bisa menjangkau daerah yang belum memiliki layanan internet, sehingga diperlukan kehadiran akses internet di fasyankes oleh BAKTI Kominfo.

“Jadi intinya kami mendukung program ini sebenarnya untuk mengakselerasi program yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, sehingga *Telemedicine* dan *Telehealth*-nya bisa menjangkau seluruh pelosok,” jelas Dirut BAKTI Anang Latif.



MENTERI KESEHATAN

DAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2 (COVID-19)

Jakarta, 20 Januari 2021



Perjuangan Nakes

Sejak awal COVID-19 tiba di Indonesia, bangsa ini menjadi saksi perjuangan tenaga kesehatan menjadi garda terdepan, melindungi diri mereka untuk melindungi kita. Para nakes rela menggunakan mantel ketika kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Keringat yang bercucuran karena kepanasan menggunakan mantel dibubuhi kekhawatiran tertular virus berlebur menjadi satu. Perjuangan mereka tidak mudah. Sejatinya, para tenaga kesehatan adalah pahlawan masa kini; pahlawan yang menjaga agar bangsa ini tetap kuat dan yakin menang lawan pandemi.

Mengingat perjuangan nakes sebagai garda terdepan melawan COVID-19, penyediaan fasilitas seperti APD, masker dan lain-lain saja tidak cukup. Infrastruktur pendukung seperti layanan internet sebagaimana yang dijelaskan di atas juga menjadi kebutuhan mendasar.

Melalui Dashboard Informasi SDM Kesehatan Indonesia dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM) Kementerian Kesehatan, jumlah fasyankes di seluruh Indonesia sebanyak 33.411 dengan rincian jenis fasyankes antara lain Dinas Kesehatan sebanyak

548, Puskesmas 10.063, Rumah Sakit 2.846, Balai Pengobatan/Kesehatan Masyarakat 353, Rumah Bersalin 148, Instalasi/Gudang Farmasi 8.226, Praktek Dokter/Dokter Gigi/Bidan Mandiri 7.814, Optik 454, Klinik 2.332 dan Laboratorium Kesehatan 627.

Dari semua jenis tersebut, puskesmas merupakan fasyankes dengan jumlah terbanyak. Puskesmas menjadi tiang utama kesehatan masyarakat terkhusus yang berdomisili di wilayah 3T, terutama selama pandemi COVID-19. Sehingga pemenuhan akan pelayanan akses internet salah satunya diprioritaskan di puskesmas.

Terkait penyediaan akses internet di 3.126 fasyankes, BAKTI Kominfo berhasil menuntaskan dalam kurun waktu tiga bulan, di tengah tantangan kondisi geografis di wilayah 3T yang sulit dijangkau, terutama di daerah pegunungan. Namun apapun tantangannya, pembangunan tetap diprioritaskan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam berbagai kesempatan kerap menyampaikan bahwa jika dilihat dari *roadmap* (peta jalan) pembangunan infrastruktur akses internet

untuk seluruh fasyankes di Indonesia, penuntasan semula ditargetkan pada tahun 2027 nanti. Namun mengingat kebutuhan teknologi dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19, penyediaan akses internet akhirnya diselesaikan tujuh tahun lebih awal.

“Artinya, hingga tahun 2022 nanti seluruh fasyankes di Indonesia akan terkoneksi dengan pelayanan internet. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah memberikan jaminan fasilitas kepada para nakes dalam melayani masyarakat yang lebih cepat, produktif dan efektif.”

Sehat Digital Sehatkan Indonesia

Indonesia saat ini juga tengah menghadapi era transformasi digital yang mendukung setiap lini kehidupan masyarakat, termasuk sektor kesehatan. Pada dasarnya, ketersediaan akses internet dimanfaatkan dalam rangka mendukung program-program pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat mengatasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mendukung penuh agenda pemerintah dalam Percepatan Transformasi Digital Nasional sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, terutama dalam peningkatan akses layanan kesehatan.

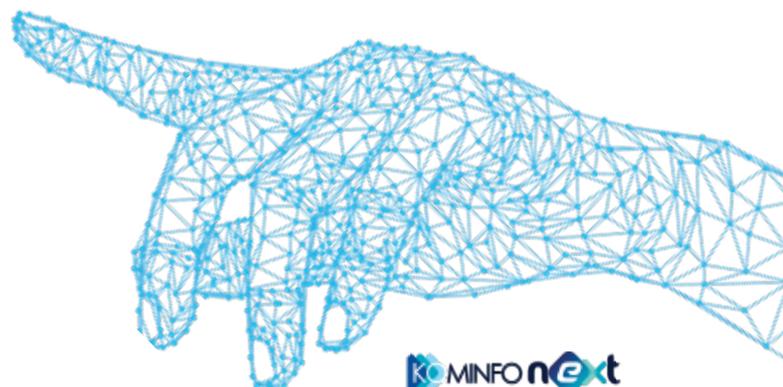
“Untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut, Kementerian Kominfo sedang menyusun Roadmap Digital Indonesia, di mana salah satu program yang termuat dalam *roadmap* tersebut adalah peningkatan akses layanan kesehatan,” kata Menteri Kominfo saat menjelaskan pentingnya kebutuhan internet di sektor kesehatan dan upaya memberikan edukasi tentang literasi digital.

Lebih jelasnya Menteri Kominfo menjelaskan, beberapa inisiatif dalam Roadmap Indonesia Digital yang perlu diimplementasikan dalam sektor kesehatan hingga tahun 2024 nanti antara lain perluasan jangkauan infrastruktur digital dalam mendukung layanan kesehatan melalui *telehealth/telemedicine*, akses penerapan registrasi kesehatan digital nasional dalam hal ini manajemen data dan *health record*.

Kemudian, pengembangan hub dan ekosistem teknologi medis, penerapan *analytics* untuk manajemen penyakit guna meningkatkan akurasi diagnosa, perluasan pelacakan kontak tracing, serta implementasi digitalisasi untuk mendorong hidup yang lebih sehat. “Lebih dari itu, Pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, dalam hal ini teknologi-teknologi digital telekomunikasi,” jelas Menteri Johnny.

Menteri Kominfo mengatakan upaya bersama antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan *stakeholders* terkait juga terus meningkatkan koordinasi dalam penyediaan aplikasi, platform, dan konten digital di sektor kesehatan.

Melihat semangat membangun negeri dari pemerintah diharapkan semakin menambah semangat masyarakat dalam merealisasikan dan mendukung nawaitu pemerintah dalam menyehatkan negeri ini, menyehatkan industri digitalisasi yang lebih baik dan bermanfaat, semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.



KOMINFO TALK

EPISODE

“ UPDATE RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI ”



Mariam F. Barata
Direktur Tata Kelola
Aplikasi Informatika



Denden Imadudin Soleh
Subkoordinator Penyusunan
Rancangan Peraturan Ditjen Aptika

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi prioritas utama pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2021. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Mariam F. Barata mengatakan bahwa awalnya, RUU PDP ini bisa ditetapkan pada Tahun 2020 lalu namun karena adanya Pandemi COVID-19 target tersebut tidak tercapai.

“RUU PDP menjadi prioritas utama Kementerian Kominfo, pembahasan sudah dilakukan namun belum sampai final dikarenakan Pandemi COVID-19. Dari total 371 DIM, sudah 136 yang selesai dibahas. Pembahasan RUU PDP akan dilanjutkan pada sidang pertama di Tahun 2021,” kata Direktur Mariam saat menjadi narasumber pada KominfoTalk Edisi Update RUU Pelindungan Data Pribadi, Jumat (18/12).

“ Rancangan UU PDP ini akan menjadi standar pengaturan nasional tentang pelindungan data pribadi, baik data pribadi yang berada di Indonesia maupun data pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.”



Pengaturan RUU PDP ini akan berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi baik yang badan hukum maupun tidak badan hukum).

Begitu UU PDP disahkan, Indonesia akan menjadi negara ke-5 di Asia Tenggara dan ke-133 di dunia. "Beberapa negara ASEAN telah memiliki aturan khusus perlindungan data pribadi seperti Malaysia (2010), Singapura (2012), Filipina (2012) dan Thailand (2019). Jika sudah diselesaikan kita akan menjadi negara ke-5 di Asia Tenggara dan ke-133 di dunia," ujar Direktur Mariam.

Direktur Mariam mengungkapkan RUU PDP ini sangat penting karena data pribadi merupakan Hak Asasi Manusia dan *privacy* yang harus dilindungi. Selain itu, terdapat fenomena "gunung es" dalam kasus pelanggaran terhadap data pribadi. "Belakangan ini baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus pelanggaran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi." ungkapnya.

Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Dunia

Gambaran Peraturan Pelindungan Data Pribadi di Berbagai Negara

Sumber: <https://www.digipendataprivacy.com/index.html>

Disusun oleh: Gernandji Satrio, ST, PMP, PIS, PIS-IT

@kominformedia

 @kominformedia

 kominformedia TV

Tantangan dari RUU PDP ini adalah diperlukan keseimbangan antara hak pemilik dan pengendali. "Semua perlu batasan antara hak pemilik data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi sehingga perlu diatur dalam RUU PDP," ujar Mariam.

Mengapa Perlu RUU PDP?

RUU PDP dikatakan Direktur Mariam merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum Indonesia. Setidaknya ada lima alasan, pertama, menghindari tumpang tindih peraturan, setidaknya ada 32 peraturan yang menyangkut Pelindungan Data Pribadi. Kedua, peraturan yang eksisting tidak komprehensif masih per sektor. Ketiga, kesulitan implementasi dan penegakan hukum, seperti kasus kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi. Keempat, meningkatnya pelanggaran data pribadi. Kelima, kesadaran publik rendah terhadap data pribadi.

Selain itu, RUU Pelindungan Data Pribadi akan memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik Warga Negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. "Undang-Undang ini akan berlaku di dalam dan luar wilayah NKRI, juga untuk semua sektor baik pemerintah/publik dan sektor privat," kata Mariam.

RUU PDP juga memiliki arti penting dalam menjamin kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan pelindungan data pribadi tidak terbatas pada kedaulatan negara dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia. Dalam RUU PDP, ada beberapa poin penting dalam pelindungan data yakni kedaulatan data, pelindungan terhadap pemilik data pribadi dan hak-hak pemilik data pribadi, serta kewajiban pengguna data pribadi.

Substansi pengaturan RUU PDP ini meliputi (1) jenis data pribadi; (2) hak pemilik data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) pengecualian terhadap pelindungan data pribadi; (5) pengendali dan prosesor data pribadi, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya; (6) pejabat/ petugas/DPO; (7) pedoman perilaku pengendali data pribadi; (8) transfer data pribadi; (9) penyelesaian sengketa; (10) larangan dan ketentuan pidana; (11) kerjasama internasional; (12) peran pemerintah dan masyarakat; (13) sanksi administrasi.

Regulasi PDP di Indonesia

Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia tersebar pada berbagai macam sektor (keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perbankan perdagangan, dan lain-lain) pada kurang lebih 32 regulasi. Namun demikian, seluruh aturan itu belum mengatur secara komprehensif mengenai pelindungan data pribadi.

"Kita membutuhkan peraturan yang lebih komprehensif untuk pelindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi yang eksisting saat ini berlakunya untuk sektor dan belum menyeluruh sehingga diperlukan regulasi yang bersifat universal," kata Direktur Mariam.

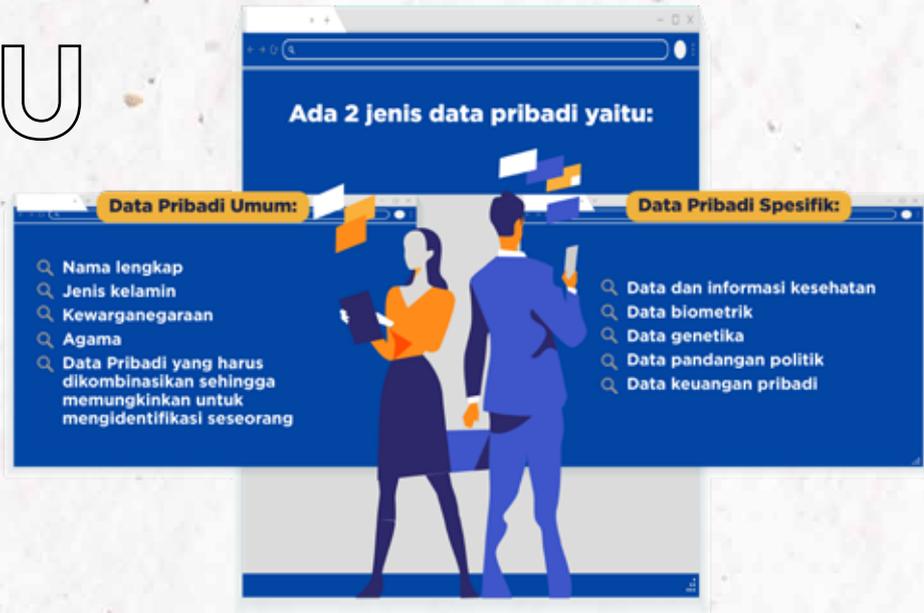
Ditambahkan Subkoordinator Penyusun Rancangan Peraturan Denden Imadudin Soleh, Kementerian Kominfo sudah mengeluarkan regulasi terkait Pelindungan Data Pribadi. "Kita memiliki regulasi terkait PDP diantaranya dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; PP Nomor 71 Tahun 2019, dan PM Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Namun regulasi tersebut lebih spesifik mengatur PDP dalam sistem elektronik dan belum selengkap RUU PDP," tambah Denden.

REGULASI EKSISTING TERKAIT PDP DI INDONESIA

UU 1/1946 (KUIIP)	UU 5/1981 (KUIIP)	UU 5/1987 (Dokumen Perusahaan)	UU 10/1988 (Perbankan)	UU 8/1999 (Pelindungan Konsumen)	UU 23/1999 (BI)	UU 31/1999 (Tikar)	UU 36/1999 (Telekomunikasi)
UU 39/1999 (HAM)	UU 30/2002 (KIPR)	UU 15/2003 (Anti Terorisme)	UU 18/2003 (Advokat)	UU 29/2004 (Praktik Kedokteran)	UU 23/2005 (Adminduk)	UU 21/2007 (IPPO)	UU 11/2008 (Dibah dengan UU 19/2018 (TE))
UU 14/2008 (KIP)	UU 21/2008 (Perbaikan Syaria)	UU 35/2009 (Narkotika)	UU 36/2009 (Kebijakan)	UU 43/2009 (Korupsi)	UU 44/2009 (Rumah Sakit)	UU 8/2010 (IP-U)	UU 17/2011 (Intelligence Negara)
	UU 18/2011 (Komisi Yudisial)	UU 21/2011 (OJK)	UU 6/2013 (Pencegahan Terorisme)	UU 7/2014 (Perdagangan)	UU 18/2014 (Kesehatan Jiwa)	UU 36/2014 (Tenaga Kesehatan)	

Apa Aja Sih Jenis-jenis Data Pribadi yang Tertuang Dalam RUU PDP?

RUU PDP



Data Pribadi Berdasarkan RUU PDP

Berdasarkan RUU PDP, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

“Terdapat perbedaan definisi mengenai data pribadi berdasarkan pengaturan eksisting dan RUU PDP. Pada PP 71 Tahun 2019, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik. Sedangkan menurut PM Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,” jelas Denden.

Pada RUU PDP terdapat dua sifat data pribadi. Pertama, data pribadi yang bersifat umum yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data

pribadi yang bersifat spesifik yaitu data dan informasi kesehatan, data *biometric*, data genetika, data pandangan politik, data keuangan pribadi.

Direktur Mariam mengungkapkan bahwa diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perlindungan data pribadi. “Adanya kontrol/kendali terhadap data pribadi oleh subjek data melalui pemenuhan hak-hak dan pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi oleh penyedia/penyelenggara dilakukan secara akuntabel dan transparan, bertanggungjawab,” ungkapnya.

Pemrosesan data pribadi harus memenuhi prinsip dan syarat sah pemrosesan. Prinsip perlindungan data pribadi antara lain terbatas, spesifik; sesuai dengan tujuannya; menjamin hak pemilik data pribadi; akurat; melindungi keamanan data pribadi; memberitahu tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan PDP; penghapusan/pemusnahan (*retensi*); serta akuntabel. Sedangkan syarat sah pemrosesan data pribadi antara lain persetujuan, perjanjian, *legal obligation*, *vital interest*, pelaksanaan kewenangan, pelayanan publik, dan *legitimate interest*.



Penasihat DWP:

Jadilah Figur

Perempuan yang **Kuat dan Hebat**



Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kominfo Maria Anna Johnny G. Plate mengajak segenap anggota DWP Kementerian Kominfo untuk menjadi sosok perempuan yang kuat dan hebat.

“Tingkatkan kepercayaan diri dan jadilah figur perempuan yang kuat dan hebat secara lahir maupun batin,”

ungkapnya dalam sambutan Acara Serah Terima Jabatan Pergantian Ketua DWP Kemenkominfo Masa Bakti 2019-2024 yang dilaksanakan secara virtual (Kamis, 14/01).

Pada kesempatan tersebut, Maria Anna juga mengajak DWP Kementerian Kominfo untuk senantiasa mengasah kreativitas dan melakukan semua aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi dengan semangat, itikad baik, dan cara-cara yang positif.

Maria Anna mengucapkan selamat kepada Ilma Nugrahani Ismail selaku Ketua Antar Waktu DWP Kementerian Kominfo beserta Pengurus Masa Bakti 2019-2024 yang telah dikukuhkan serta tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Niniek Basuki Yusuf Iskandar selaku Ketua DWP Kementerian Kominfo beserta Pengurus Masa Bakti 2016-2020 atas kinerja dan pengabdian yang luar biasa.

Dalam sambutan pengukuhan, Ilma Nugrahani Ismail berharap DWP Kementerian Kominfo bisa menjadi perpanjangan tangan Kominfo untuk masyarakat selain menjadi tempat untuk mengembangkan diri dan bersilaturahmi.

“Secara teknis dengan melakukan kegiatan dengan kekhasan Kementrian Kominfo sebagai jantung dan organ utama komunikasi bangsa khususnya di era pandemi yang sangat membutuhkan dukungan telekomunikasi informasi di segala bidang utamanya pendidikan dan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Ilma juga berharap adanya kaderisasi dan pembinaan baik vertikal di antara direktorat-direktorat di Kominfo maupun secara horisontal ke Balmon dan Loka Kominfo di provinsi dan daerah.



✦ Anak TK masuk PT ✦

Ninie Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa Niniek awalnya masih bingung saat harus menandatangani Sertijab selaku Ketua DWP diawal kiprahnya di Dharma Wanita Persatuan. "Masih cukup jelas dalam ingatan saya, kala itu 2 Juni 2005, setelah saya menyaksikan suami yang dilantik menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, saya digelandang oleh Ibu-ibu DWP Postel dan dimasukan dalam satu ruangan yang sudah dipenuhi tamu undangan," cerita Niniek.

"Saat itu saya harus menandatangani Sertijab, bingung dan tak pernah menduga. Saya katakan bahwa saya seperti anak TK masuk PT tapi apa mau dikata, saya harus menjalani dan tak terasa 15 tahun sudah," kenangannya.

Menurutnya, selama kepengurusannya di DWP, Niniek tidak merasa duka dan getir. "Kalaupun ada, itu sudah terbawa angin kegembiraan dan kebahagiaan jika bertemu Ibu-ibu DWP Kementerian Kominfo," katanya.

Ninie mengucapkan terima kasih kepada Para Penasihat DWP Kominfo selama Niniek mengemban pengabdianya di DWP Kominfo yang menurutnya adalah lima Kartini yang tangguh yang menjadi spirit bagi DWP Kominfo. "Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu-Ibu Penasihat dari Ibu Ratna Megawangi, Ibu Laili Muhammad Nuh, Ibu Yayuk Tifatul Sembiring, Ibu Triana Rudiantara, dan saat ini Ibu Maria Anna Johnny G Plate yang memberikan contoh kepemimpinan yang baik, smart, tetapi tetap sederhana dan bersahaja," tuturnya.

Diakhir sambutannya, Niniek memberikan pantun bagi Ketua dan Kepengurusan DWP Kominfo yang baru.

“

*Selampe warna hijau itu
buatanmu*

Dipakai Saat Berkebaya

*DWP Kominfo di
tanganmu*

Akan semakin jaya ”

✦ Susunan Pengurus DWP Kominfo 2019-2024 ✦

Ilma Nugrahani Ismail disahkan sebagai Ketua dan Pengurus Antar Waktu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Masa Bakti 2019-2024 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua

Wakil Ketua I (Sekretariat)

Wakil Ketua II (Pendidikan)

Wakil Ketua III (Ekonomi)

Wakil Ketua IV (Sosbud)

Sekretaris

Wakil Sekretaris I

Wakil Sekretaris II

Bendahara I

Bendahara II

: Ilma Nugrahani Ismail

: Nia Anita Ahmad M. Ramli

: Herawati Widodo

: Ratna Samuel Pangerapan

: Sri Untari Doddy Setiadi

: Sakinah Anang Latif

: Santi Deni Setiawan

: Ning Indra Maulana

: Ni Wayan N. Supriyanto

: Devi Ikhsan Baidirus

———— Bidang-bidang ————

Bidang Pendidikan

Ketua

: Henti Bambang Dwi Anggono

Anggota

: 1. Lilis Fajar Budiantoro

2. Risi Mulyadi

3. Inet Eko Bakti Candra Jaya

Bidang Ekonomi

Ketua

: Elly Susanto

Anggota

: 1. Uci Cecep

2. Rita Zamrudi

3. Lucie Cinatra Siswoko

Bidang Sosial Budaya

Ketua

: Dini Sabirin Mochtar

Anggota

: 1. Dian Ahmad Juhari

2. Dinar Moestamin Noer Halim

3. Elfi Muchtarul Huda

4. Sri Badriyah Kusworo

✦ Kiprah DWP Kominfo 2016-2020 ✦

Kegiatan-kegiatan DWP Kementerian Kominfo antara lain dilaksanakan oleh Sekretariat, Bendahara, Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya.

Menurut Niniek Basuki Yusuf Iskandar, seluruh program kerja dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta dana yang tersedia. "Sejumlah kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun beberapa kegiatan yang bersifat tatap muka seperti kunjungan, belum dapat dilaksanakan karena kebijakan pemerintah maupun Kementerian Kominfo atas dampak Pandemi COVID-19," katanya.

DWP Kemkominfo menghadiri/ mengikuti rapat-rapat/ kegiatan yang diadakan oleh DWP Pusat antara lain; mengikuti kunjungan ke Pusat Rehabilitasi BNN Lido Sukabumi pada tanggal 14-15 September 2016, mengikuti Workshop Petugas Posbindu yang diadakan oleh DWP Pusat bekerja sama dengan Direktorat Promosi Kesehatan RI pada tanggal 26-27 September 2016, dan menghadiri Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga yang diselenggarakan oleh DWP Pusat bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 Agustus 2017.

DWP Kemenkominfo juga menghadiri rapat-rapat/ kegiatan yang diadakan Kemenkominfo antara lain; berpartisipasi sebagai penanggung jawab perlombaan

menghias wajah, memakai jilbab, dan berkebayang luwes dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 20-21 April 2017, menghadiri undangan rapat persiapan Bazaar Murah dalam rangka menyambut Ramadhan 1438 H pada tanggal 23 Mei 2017, menghadiri rapat koordinasi dari Sekjen Kemkominfo pada tanggal 27 Agustus 2020 yang membahas permasalahan ruang kantin Kemenkominfo, Tempat Penitipan Anak (TPA), dan rencana layanan kantin pada masa Pandemi COVID-19. DWP juga aktif menghadiri/ mengikuti rapat-rapat/ kegiatan yang diadakan oleh DWP IPP/ KOWANI/ Organisasi/ Kementerian Lembaga/ Badan lainnya.

Di bidang pendidikan, DWP mengutamakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan (formal/ informal), pengetahuan, keterampilan serta sikap mental anggota DWP, keluarga, serta masyarakat sekitarnya. Lingkup kegiatan bidang pendidikan meliputi pendidikan formal dan pendidikan informal.

Dalam bidang pendidikan formal, DWP Kominfo membina 11 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Semai Benih Bangsa (SBB) bekerja sama dengan Indonesia Heritage Foundation (IHF) dan PT. Excelcomindo Pratama Tbk dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejak tahun 2006 dan 1 PAUD Palembang yang diberikan oleh Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010. DWP melaksanakan sosialisasi pada setiap kunjungan





ke PAUD/ SBB dengan tema seperti parenting, manfaat daun kelor untuk kesehatan, pembuatan tepung ikan, dan pengurangan penggunaan plastik. Selain itu, DWP juga mengelola Tempat Pengasuhan Anak (TPA) Dharma Ananda yang berlokasi di Kementerian Kominfo.

Sementara untuk kegiatan Pendidikan Non Formal/ Informal, DWP antara lain mengadakan penyuluhan mengenai obat-obatan "DAGUSIBU" (DA-patkan, GU-nakan, SI-mpan, dan BU-ang) dalam rangka menyambut Hari Kartini pada tanggal 11 April 2018. DWP juga mengadakan seminar dengan tema "Stunting dan Kebutuhan Gizi Anak" pada tanggal 12 Desember 2018.

Dari sisi ekonomi, DWP mengadakan usaha guna mendapatkan pemasukan untuk membiayai semua kegiatan organisasi. Adapun lingkup kegiatan usaha DWP Kemenkominfo yaitu Waroeng Dhewe, Kantin Kominfo, dan penyelenggaraan Bazaar Murah.

Dalam bidang sosial budaya, kegiatan DWP Kominfo meliputi kegiatan yang terdiri dari Iman dan Takwa, Gerakan Sehat, Olahraga, Bakti Sosial, Bantuan Sosial, Kegiatan Hari Besar Nasional, dan Kegiatan Seni Budaya/ Nilai Budaya.



Uji Coba Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19

di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



Kunjungan Kerja Menkominfo Johnny G. Plate

Menteri Kominfo Johnny G. Plate disambut oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat melakukan kunjungan kerja Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



**Kunjungan Kerja
Menkominfo
Johnny G. Plate**

Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat melakukan kunjungan kerja Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



**Kunjungan Kerja
Menkominfo Johnny G. Plate**

Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat melakukan kunjungan kerja Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



Kunjungan Kerja Memkominfo Johnny G. Plate

Menteri Kominfo Johnny G. Plate (tengah) bersama Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat memberikan keterangan untuk pekerja media mengenai Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



**Kunjungan Kerja
Menkominfo
Johnny G. Plate**

Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat memberi salam kepada Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pada kunjungan kerja Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).

Sambutan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat melakukan kunjungan kerja Menkominfo mengenai Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



Kunjungan Kerja Menkominfo Johnny G. Plate

Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat doorstop dengan Awak Media yang hadir saat kunjungan kerja Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).



Kunjungan Kerja Menkominfo Johnny G. Plate

Seorang Petugas Puskesmas sedang melayani pegawai yang akan di vaksin di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).





AWOKWOKWOK



MALAM SEBELUM PARTY





Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Transformasi Digital

Oleh: **Ahmad Irsu Kubangun**

Melihat Indonesia di usia ke-75 tahun bukan lagi berbicara mengenai era penjajahan, namun lebih kepada hakikat kemerdekaan dan menghadirkan generasi penerus bangsa yang unggul dari era ke era, dari zaman ke zaman, hingga dari masa ke masa. Pada era teknologi kekinian, Indonesia harus mampu menggapai dunia dengan mengendalikan, menguasai dan menciptakan teknologi. inilah yang kita kenal sebagai transformasi digital.

Transformasi digital merupakan sebuah proses panjang dari teknologi yang terus berkembang seiring perubahan kehidupan sosial. Dengan kata lain, transformasi digital diartikan sebagai pengintegrasian teknologi dari waktu ke waktu dalam rangka menunjang kebutuhan hidup manusia. Mengapa transformasi digital begitu pentingnya dalam kehidupan sosial dewasa ini, terkhusus menyoal misi Indonesia Maju?

Kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara maju jika tidak mengendalikan, menguasai, bahkan menciptakan teknologi. Layaknya negara-negara maju dengan sumber daya manusia yang begitu unggul dan hebat, Indonesia pun demikian. Kita mulai beranjak maju untuk bertransformasi dengan membekali talenta-talenta kita di bidang teknologi. Para talenta digital itu sebagai pewaris dan masa depan bangsa ini dalam mewujudkan transformasi digital.

Lantas apa kebutuhan paling mendasar ketika pemerintah saat ini telah menyiapkan dengan sungguh-sungguh talenta digital? Kebutuhannya adalah persatuan dan kesatuan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai hak setiap warga negara sesuai dengan UUD 1945.

Adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Kita meyakini bahwa dengan memiliki landasan organisasi, kekerabatan, keberagaman dan kesolidan yang terbangun, ormas memiliki peran sangat strategis dalam mewujudkan transformasi digital. Kehadiran ormas mendukung program dan kebijakan pemerintah mengenai transformasi digital akan berpengaruh kepada masyarakat luas untuk mengenal dan semakin memahami apa tujuan bertransformasi di era digital.

Berdasarkan data dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri per 31 Juli 2019, jumlah ormas di Indonesia sebanyak 420,381 ormas. Bayangkan, dengan jumlah yang begitu banyak, masing-masing ormas tentu menghimpun kekuatan masyarakat yang juga tidak sedikit jumlahnya. Jika ratusan ribu ormas tersebut ikut mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah tentang transformasi digital kepada masyarakat tentu akan berdampak signifikan. Secara tidak langsung, tidak saja pemerintah yang siap bertransformasi tetapi masyarakat Indonesia pada umumnya pun siap berjibaku dalam ruang-ruang digital yang sehat, kreatif, inovatif dan bermutu.

Serbadigital

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu institusi pemerintahan yang memegang peran besar mewujudkan transformasi digital, telah menghimpun begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat atau ormas di berbagai program. Misalnya saja pada program seputar literasi digital. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, saat ini bergabung 108 komunitas dari berbagai unsur lapisan masyarakat di GNLD Siberkreasi. Mereka ikut serta sebagai relawan untuk meliterasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan teknologi dan ruang-ruang digital dalam kehidupan bermasyarakat; di antaranya melawan pelbagai isu hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga menangkal terorisme, radikalisme, serta konten perjudian dan pornografi yang dapat merugikan masyarakat. Begitu pentingnya literasi digital seakan memanggil komunitas atau ormas untuk ikut berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa.

Program lainnya yang juga dicetuskan oleh Kementerian Kominfo untuk mendukung transformasi digital adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM perlu terus didorong untuk bertransformasi dari penjualan fisik ke penjualan online yang kita kenal dengan digitalisasi UMKM. Kementerian Kominfo sendiri mempunyai program UMKM Go Digital yang menghimpun ratusan UMKM rintisan untuk bermigrasi ke ruang digital.

Dengan mendorong UMKM bermigrasi ke ranah digital maka dengan sendirinya menghantarkan Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital, sebagai salah satu bagian yang sangat penting dalam mewujudkan transformasi digital. Nah, bagaimana kemudian peran ormas atau komunitas mendorong masyarakat bermigrasi ke digital?

Tentu kita menginginkan ormas atau komunitas di Indonesia ikut berbicara menyampaikan ide dan gagasan mereka tentang pentingnya transformasi digital di setiap program dan kegiatan yang dilakoni, karena kita menyadari penuh bahwa hampir semua aktivitas keseharian masyarakat tidak terlepas dari peran teknologi. Inilah yang dimaksud dengan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber teknologi untuk kepentingan bersama. Apalagi saat ini Indonesia dan juga dunia masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19, sehingga pemanfaatan sumber daya digital menjadi kian meningkat.

Melawan Pandemi dengan Digital

Pandemi COVID-19 terus menarik angka kasus terinfeksi dan angka kematian yang semakin tinggi setiap harinya. Tidak saja Indonesia. Dunia bahkan sedang mencari 'solusi cantik' agar bagaimana bisa mencabut pandemi ini dari akarnya. Tidak mudah memang, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Sebab, kita semua rindu akan hidup dalam kenormalan, beraktivitas tanpa jarak, berinteraksi tanpa menggunakan masker, bahkan bersalaman tanpa sekat.

Hampir setahun sudah Indonesia berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Awal tahun 2021 yang sebelumnya diprediksi kehidupan akan kembali normal rupanya tak kunjung tiba. Dalam kondisi ini, tidak sepatutnya pula saling menyalahkan. Yang terpenting dan yang utama adalah bahu-membahu, bergandengan tangan dan bersatu dalam panggilan Ibu Pertiwi agar secara bersama-sama mengakhiri wabah ini dengan menaati segala peraturan dan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Inilah kunci utamanya.

Di samping mengedepankan kedisiplinan bersama, pemerintah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan strategis dan peraturan yang mengikat pada karakter dan budaya bangsa. Pun demikian halnya dengan masyarakat yang dalam proses hidupnya secara perlahan berdamai dengan pandemi COVID-19 dengan disiplin dalam menerapkan 3M; Menggunakan Masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.

Lalu apa selanjutnya yang harus kita perjuangkan bersama untuk mengatasi pandemi yang ternyata jumlah peningkatan kasusnya semakin bertambah? Kembali menyoal peran ormas. Benang merahnya adalah tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan semua sumber daya digital sebagai alat juang melawan pandemi.

Dengan digital kita mampu menyatukan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dengan digital kita ikut membantu tenaga kesehatan menyembuhkan masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Dengan digital pula anak-anak bangsa tetap belajar meskipun tidak di lingkungan sekolah. Bahkan juga dengan digital kebutuhan primer kita terpenuhi.

Semuanya adalah nawaitu pemerintah dalam melakukan transformasi digital, bergerak maju ke arah perubahan yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Karena begitu pentingnya transformasi digital membuat pemerintah terus menhadirkan program dan kebijakan yang relevan dengan perkembangannya. Oleh karena itu, sudah saatnya ribuan ormas di Indonesia mengambil perannya bersama pemerintah untuk mengajak dan mendorong masyarakat bertransformasi pada semua lini kehidupan sosial.

Dorong Kerja Lebih Produktif, Menkominfo Tekankan Enam Fokus Tahun 2021



Menteri Kominfo Johnny G. Plate bersama jajaran pimpinan dalam Rapat Virtual Menkominfo Menyapa: Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju, dari Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (04/01/2021). - (Indra Kusuma)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan enam fokus utama untuk melakukan akselerasi transformasi digital di Indonesia. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mendorong seluruh sivitas untuk bekerja lebih produktif dan efektif untuk melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada kita apa yang menjadi tugas kita. Catatan yang pertama komunikasi publik Kominfo harus lebih proaktif di tahun 2021, pembangunan infrastruktur TIK untuk tersedianya akses 4G yang merata dengan bandwidth yang memadai serta penataan spektrum frekuensi radio, pembangunan pusat data nasional, digitalisasi penyiaran, dan ekonomi

digital,” paparnya merangkum arahan dalam Rapat Virtual Menkominfo Menyapa: Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju, dari Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Dalam hal komunikasi publik, Menteri Johnny meminta agar bisa menghasilkan narasi-narasi yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. “Kehadiran komunikasi publik melalui narasi informasi, literasi yang akurat akan membantu masyarakat untuk bisa lebih kuat dalam mengatasi COVID-19, bisa membantu masyarakat untuk memahami dengan baik kebijakan pemerintah sehingga tidak terjadi disinformasi, tidak berkembangnya hoaks,” tegasnya.

Menurut Menteri Kominfo, masyarakat tidak boleh menjadi penonton, oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui informasi yang benar. “Jadi ini tugas komunikasi publik yang harus didesain oleh Kominfo. Komunikasi publik harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk kenyamanan dan menghindarkan masyarakat terasa takut,” harapnya. Fokus kedua Kementerian Kominfo yakni menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) khususnya untuk memastikan tersedianya sinyal 4G di seluruh wilayah Tanah Air yang menjadi tempat permukiman dan layanan publik di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai kita menghadirkan sinyal di puncak gunung tapi gak ada orang tinggal di sana. Kita

harus mendekatkan atau menghadirkan sinyal di wilayah permukiman masyarakat atau di mana ada fasilitas layanan publik untuk mendukung itu,” kata Menteri Johnny.

Hal ketiga yang menjadi fokus Kementerian Kominfo di tahun 2021 adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang mendukung Satu Data Indonesia serta *electronic government*. “Yang paling besar pekerjaan kita selesaikan Pusat Data Nasional kita, karena dari situlah nanti *electronic government* bisa kita jalankan,” tandas Menteri Kominfo seraya mengharapkan akan terwujud efisiensi ruang digital.

Menurut Menteri Johnny fokus keempat tersedianya bandwidth yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan spektrum frekuensi radio dan tata kelola bandwidth di seluruh Indonesia.

“Kominfo juga mengelola spektrum frekuensi radio dan membangun pusat monitoring bandwidth sehingga bisa melihat, mengatur dan melakukan tata kelola bandwidth. Sehingga tidak terjadi di wilayah tertentu kelebihan *bandwidth*, wilayah yang lain malah kekurangan *bandwidth*, ini harus diatur dengan baik,” jelasnya.

Sedangkan, fokus Kementerian Kominfo yang kelima berkaitan dengan digitalisasi penyiaran. Menurut Menteri Kominfo saat ini di Indonesia masih berlangsung *simulcast*, yaitu layanan siaran analog berdampingan dengan siaran digital. Adapun *Analog Switch Off* ditargetkan pada 2 November 2022 tepat di jam 24.00 untuk Waktu Indonesia Barat.

“Ini pekerjaan besar yang tidak sederhana yang harus menjadi fokus kita di tahun 2021, karena keputusannya nanti begitu, PP (Peraturan Pemerintah) nanti ditandatangani, Permen-nya (Peraturan Menteri) disiapkan semuanya untuk hal-hal yang secara teknis,” tandasnya.

Fokus ke enam yang dijalankan sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah membangun ekonomi digital. Menurut Menteri Johnny, potensi ekonomi digital Indonesia sangat tinggi, mengutip data BPS, 60% PDB Nasional disumbang oleh UMKM. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo harus membantu pelaku UMKM dan Ultra Mikro beralih ke digital.

“Secara khusus pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo menekankan untuk on boarding UMKM ultramikro digital. Jadi kita harus membantu bagaimana mereka bermigrasi dan bertransformasi dari UMKM konvensional menjadi konvensional yang saat ini baru sekitar 10 juta dari 64 juta UMKM di Indonesia. Karenanya tugas kita juga untuk memberikan dukungan, *on boarding* UMKM digital,” paparnya.

Kerja Akuntabel

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kominfo mengharapkan dalam menjalankan tugasnya, seluruh jajaran Kementerian Kominfo tetap mengedepankan akuntabilitas. Menurutnya, selama ini akuntabilitas Kementerian Kominfo berjalan dengan baik. Salah satunya membawa Kementerian Kominfo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Opini dari BPK ini terus menerus berulang-ulang, sudah empat kali Kominfo mendapatkan Opini WTP itu. Tetapi kali ini, tahun 2021 ini pekerjaan kita semakin besar. Karena apa? Tahun 2021 ini justru akselerasi pembangunan infrastruktur yang ditugaskan kepada Kementerian Kominfo,” ujarnya.

Menteri Johnny menyatakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi membuktikan peran yang luar biasa signifikan.

“Justru Kominfo mengambil peran pembangunan infrastruktur fisik secara besar-besaran menjangkau hampir seluruh wilayah nasional kita, seluruh wilayah 3T di dua tahun kedepan harus terkoneksi, tersedianya sinyal 4G, dan untuk itu kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi pembiayaan melalui *blended financing* atau bauran pembiayaan yang pertama kali dilakukan,” tandasnya.

Menurut Menteri Kominfo, sebelumnya intervensi pembiayaan dikenal hanya dua yaitu pembiayaan melalui belanja operator seluler dan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Universal Service Obligation (USO) oleh BLU BAKTI. “Kali ini menjadi empat model pembiayaan; pembiayaan oleh operator seluler, pembiayaan oleh *Universal Service Obligation* oleh BAKTI, ditambah dua yaitu rupiah murni dari APBN dan alokasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Kominfo,” paparnya.

Selain itu, Menteri Johnny memberikan perhatian untuk pengembangan sumberdaya manusia. Menurutnya banyak program yang telah dijalankan, diantaranya Gerakan Nasional Literasi Digital bersama dengan Ditjen Aptika, Digital Talent Scholarship hingga Digital Leadership Academy.

“Saya tentu berharap merancang program-program untuk mendukung SDM Indonesia dan SDM Kominfo tentu di dalamnya yang digital minded, yang punya kemampuan keterampilan digital,” ujarnya.

Menteri Johnny meyakini Kementerian Kominfo memiliki jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama serta seluruh sivitas yang hebat dan berpengalaman. Oleh karena itu, Menteri Kominfo optimistis jajarannya bisa mencapai target fokus pembangunan pada tahun 2021. “Mari kita jaga bersama-sama akuntabilitas dan proses yang *prudent* karena ini urusan negara,” tandasnya.

Alami Penyempurnaan Fitur, Aplikasi PeduliLindungi Aman Digunakan

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan Aplikasi PeduliLindungi telah mengalami penyempurnaan fitur dan ketentuan penggunaan sehingga tetap aman digunakan.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan saat ini Aplikasi PeduliLindungi untuk sistem operasi Android telah dikembangkan sampai versi 3.1.1. Menurutnya, versi terkini telah mengalami banyak penyempurnaan fitur dan izin akses.

“Saat ini versi PeduliLindungi Android adalah 3.1.1 dimana sudah banyak perbedaan fitur aplikasi dan izin akses yang tidak digunakan di versi terbaru. Pada versi 3.1.1 tidak ada lagi penggunaan fitur Bluetooth, WiFi, kamera, dan file access untuk penyimpanan,” jelasnya di Jakarta, Selasa (05/01/2021).

Merespons informasi tersebar mengenai fitur dan izin akses Aplikasi PeduliLindungi, Jubir Dedy Permadi menegaskan informasi itu didasarkan pada versi terdahulu aplikasi. “Versi PeduliLindungi Android yang dibahas dan dijadikan isu adalah versi 2.2.2 yang dirilis tanggal 25 Juni 2020,” tandasnya.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo, izin akses yang dipakai dalam aplikasi PeduliLindungi sepenuhnya telah melalui persetujuan dari pengguna saat instalasi aplikasi.

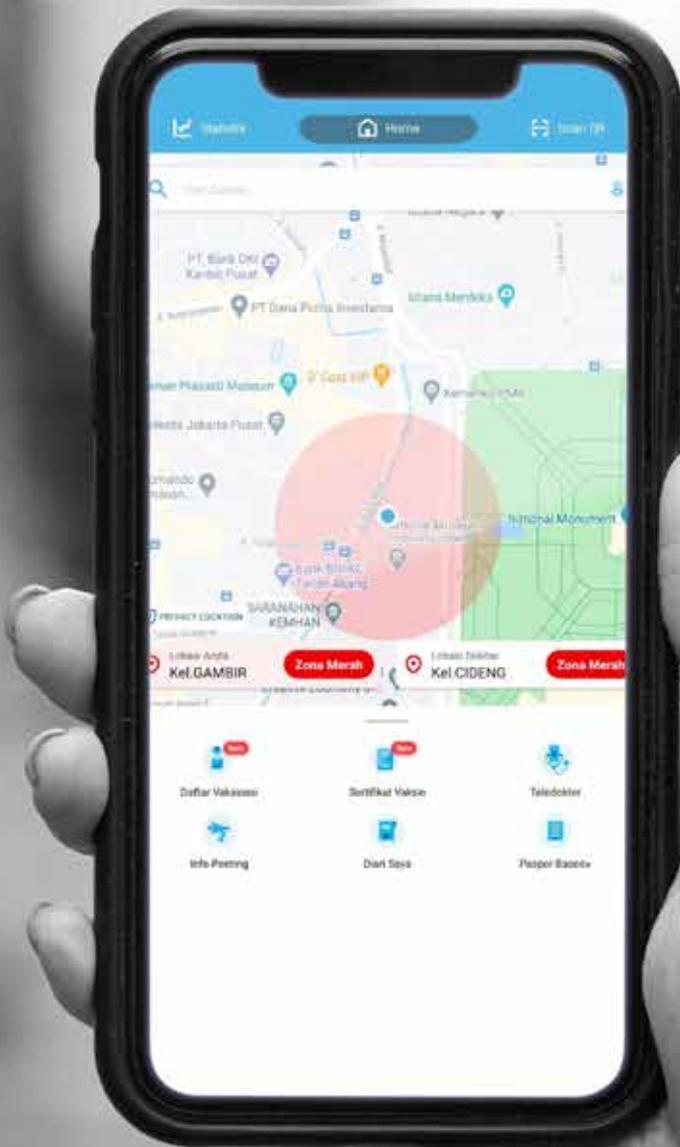
“Izin akses yang digunakan pada aplikasi semata-mata untuk meningkatkan user experience dan benefit bagi user saat menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” tegasnya. Jubir Dedy Permadi menyatakan Aplikasi PeduliLindungi tidak hanya menyediakan fitur contact tracing tapi juga fitur informasi lokasi terdampak yang bermanfaat bagi user untuk waspada dan menghindari saat berada di lokasi tersebut.

“Untuk itu akses geolokasi pada telepon seluler diperlukan untuk memberikan informasi berharga ini,” tuturnya.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo kebijakan privacy PeduliLindungi tercantum pada <https://pedulilindungi.id/kebijakan-privasi-data> sudah mendapat persetujuan pihak Google Play Store.

“Termasuk tidak akan menggunakan data dan informasi untuk keperluan komersial dan perlakuan aplikasi terhadap data sensitif,” ujarnya.

Dalam laman <https://pedulilindungi.id/syarat-ketentuan>, tertulis Aplikasi PeduliLindungi tidak mengambil data daftar kontak di ponsel pengguna. Namun demikian,



data yang diperlukan sesuai persetujuan pengguna disimpan sementara di penyimpanan lokal ponsel dan secara terenkripsi dikirim ke server secara berkala. Data-data tersebut disimpan secara terenkripsi di server PeduliLindungi yang aman dan tidak dibagikan ke publik. Data pengguna hanya akan diakses bila pengguna dalam risiko tertular COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Data pengguna tidak akan diserahkan atau disebarluaskan kepada pihak lain kecuali kepada instansi pemerintah yang saat ini ditunjuk dalam menangani Pandemi COVID-19, atau karena ketentuan hukum.

Dalam siaran pers sebelumnya, Jubir Dedy Permadi menyatakan pengaturan perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi telah tercantum pada Keputusan Menteri Kominfo No. 253 Tahun 2020. Menurutnya, aplikasi itu dijamin aman dengan Keputusan Menteri Kominfo No 171 Tahun 2020 yang melengkapi keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Pos dan Informatika.

Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang digunakan oleh Instansi Pemerintah RI untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran COVID-19 di wilayah RI. Saat ini aplikasi itu sudah diunduh oleh lebih dari 26 juta pengguna dan akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang menjangkau sekitar 180 juta penduduk.

Kelanjutan Penggunaan Filing Satelit Indonesia di Slot Orbit 113BT

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting bagi perkembangan suatu negara, terlebih untuk Indonesia dengan kondisi geografis Indonesia negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Pemerataan ketersediaan infrastruktur memiliki tantangan tersendiri, mulai dari ketersediaan sarana transportasi, pasokan listrik, dan BBM. Namun demikian, tantangan itu tidak menyurutkan tekad pemerintah memberikan layanan TIK kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah 3T, Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Guna meningkatkan penyediaan dan pemerataan akses TIK di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Proyek Palapa Ring. Proyek Palapa Ring menyediakan akses kabel

serat optik kecepatan tinggi dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia.

Penyediaan akses telekomunikasi khususnya di daerah 3T akan sangat sulit jika hanya menggunakan jaringan telekomunikasi terestrial saja, sehingga diperlukan jaringan satelit agar akses telekomunikasi lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo telah memulai Proyek Satelit Multifungsi agar layanan telekomunikasi dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Melalui proyek itu, Kementerian Kominfo direncanakan akan meluncurkan Satelit Multifungsi pada tahun 2023 guna menghadirkan akses wifi gratis di 150.000 titik layanan publik di berbagai penjuru nusantara.

Selain upaya di atas, Kementerian Kominfo juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan satelit Indonesia yang saat ini telah beroperasi. Upaya itu diperlukan agar satelit tetap dapat memberikan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia, khususnya satelit yang akan berakhir masa operasinya.

Salah satu satelit Indonesia yang berakhir masa operasi pada tahun 2020 adalah Satelit Palapa D di slot orbit 113 BT. Untuk menggantikan Satelit Palapa D tersebut, Indonesia telah meluncurkan Satelit Nusantara 2 pada bulan April 2020. Namun, Satelit Nusantara 2 tersebut mengalami gagal luncur sehingga tidak berhasil ditempatkan di slot orbit 113 BT.

Salah satu dampak kegagalan peluncuran Satelit Nusantara 2 adalah potensi penghapusan filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT oleh International Telecommunication Union (ITU) karena Indonesia tidak dapat menempatkan satelit di slot orbit 113 BT dalam batas waktu yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kominfo telah mengajukan permohonan perpanjangan masa laku filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. Radio Regulations Board ITU menerima permohonan Indonesia tersebut dan Indonesia diberikan waktu hingga 31 Desember 2024 untuk menempatkan satelit di slot orbit 113 BT.

Mempertimbangkan batas waktu yang telah diberikan ITU hingga 31 Desember 2024 tersebut, Kementerian Kominfo perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan batas waktu tersebut dapat dipenuhi.

Langkah awal yang telah dilakukan yaitu membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kelanjutan penggunaan slot orbit 113 BT oleh Indosat selaku pengguna filing satelit Indonesia di slot

orbit itu. Berkaitan dengan hal itu, Indosat menyatakan tidak dalam posisi untuk kembali melakukan investasi meluncurkan satelit di masa akan datang, sehingga Indosat tidak akan melanjutkan penggunaan filing satelit pada slot orbit 113^oBT setelah masa operasi satelit Palapa D berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat kepada Indosat yang menyatakan hak penggunaan filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT tidak diperpanjang setelah masa operasi satelit Palapa D berakhir.

Langkah berikutnya yang telah dilakukan Kementerian Kominfo yaitu melakukan proses evaluasi terhadap calon pengguna baru filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. Proses evaluasi itu bertujuan untuk mencari pengguna baru slot orbit 113 BT yang dinilai mampu untuk menempatkan satelit

di slot orbit 113 BT sebelum 31 Desember 2024. Dalam proses evaluasi itu, dilakukan penilaian terhadap aspek finansial, regulatori, teknis, dan bisnis dari para calon pengguna slot orbit 113 BT.

Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan tersebut, Kementerian Kominfo menetapkan PT Telkom Satelit Indonesia sebagai pengguna baru filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT. PT Telkom Satelit Indonesia merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia yang menangani urusan satelit. Saat ini PT Telkom Satelit Indonesia sedang mengoperasikan satelit Merah Putih di slot orbit 108 BT, satelit Telkom 3S di slot orbit 118 BT, dan satelit Telkom 2 di slot orbit 157 BT.

Kementerian Kominfo selanjutnya akan melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap proses pengadaan satelit yang akan dilakukan oleh PT Telkom Satelit Indonesia agar satelit dapat ditempatkan di slot orbit 113 BT sebelum 31 Desember 2024 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh ITU.

Upaya-upaya di atas merupakan bagian dari langkah-langkah Kominfo untuk memastikan agar penyediaan layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia tetap terlaksana.

UPAYA PENYEDIAAN DAN PEMERATAAN AKSES TIK DI INDONESIA, KEMENTERIAN KOMINFO SIAPKAN PENGGUNA BARU FILLING SATELIT INDONESIA DI SLOT ORBIT 113 BT

Kementerian Kominfo terus gencarkan penyediaan dan pemerataan akses TIK di Indonesia. Setelah Palapa Ring, Satelit Multifungsi SATRIA akan dihadirkan pada tahun 2023 dengan akses wifi gratis di 150.000 titik layanan publik di berbagai penjuru nusantara.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan satelit Indonesia yang saat ini telah beroperasi.

2023
WIFI GRATIS
150.000
TITIK LAYANAN PUBLIK

Kementerian Kominfo telah menetapkan PT Telkom Satelit Indonesia sebagai pengguna baru filing satelit Indonesia di slot orbit 113 BT.

Saat ini, PT. Telkom Satelit Indonesia sedang mengoperasikan :



- **SATELIT MERAH PUTIH DI SLOT ORBIT 108 BT**
- **SATELIT TELKOM 3S DI SLOT ORBIT 118 BT**
- **SATELIT TELKOM 2 DI SLOT ORBIT 157 BT**

PT. Telkom Satelit Indonesia direncanakan untuk bisa menempatkan satelit di slot orbit 113 BT sebelum tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU).





müspen 
MUSEUM KOMUNIKASI & INFORMATIKA
saksi perubahan generasi



Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13560 - Indonesia



Museum Penerangan

Museum milik



Bentuk Gedung
Bersudut Lima
Melambangkan

PANCASILA



Diprakarsai oleh

Ibu
TIEN SOEHARTO

Diresmikan 20 April 1993 oleh

PRESIDEN
SOEHARTO

Lebih dari

400
Koleksi

Bertema Komunikasi

“

Komunikasi sudah dilakukan oleh manusia sejak pertama kali diciptakan dan dilahirkan. Salah paham hingga berita bohong juga bukanlah hal baru dalam peradaban manusia. Berkembangnya Indonesia mulai dari perjuangan melawan penjajah hingga era digital saat ini, tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Semua terekam dan tersimpan dalam Museum Penerangan, sebagai saksi perubahan generasi. Bagaimana layanan informasi dan alat komunikasi berkembang di masa lalu dapat menjadi acuan bagi bangsa untuk memajukan negara Indonesia. Semakin digital, semakin maju.

Museum Penerangan tidak hanya menyimpan dan memamerkan koleksi saja, namun juga bisa membawa masyarakat merasakan pengalaman baru melintasi peradaban, masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Saya jamin, pengunjung akan mendapatkan inspirasi dan ide baru setelah berkunjung ke Museum Penerangan.

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika RI





Gedung Museum Pencerahan berbentuk bintang bersudut lima yang melambangkan Pancasila. Terdapat juga Patung Api Nan Tak Kunjung Padam (ANANTAKUPA) yang berarti

“
Informasi benar dapat
menerangi dunia.”



Ruang Kontemplasi yang terletak di Lt. 2 menyimpan koleksi relief sejarah layanan informasi di Indonesia.

Virtual Experience Muspen

Inovasi terbaru dari Museum Penerangan.

Selama berkeliling museum secara virtual, masyarakat akan ditemani oleh pemandu bersertifikat.

Lebih dari **50.000** Masyarakat Indonesia dicerdaskan melalui *Virtual Experience* Museum Penerangan.

Beberapa sekolah yang telah mengikuti Virtual Experience Museum Penerangan:

Sekolah Indonesia Cairo
KB-TK Islam Ibnu Hajar
TK Happy Holy Kid
SD Global Prestasi
SD Islam Al-Azhar 46
SMP Islam Kreatif Muhammadiyah
SMP dan SMA Pelita Bangsa Bandung
SMAN 3 Salatiga





Simak profil dan koleksi lengkap Museum Penerangan melalui tautan berikut:

<https://komin.fo/muspen>



10 Hoaks Terpopuler Januari 2021

1 [DISINFORMASI] Kandungan Zat BPA pada Galon Isi Ulang Berbahaya

Beredar di media sosial informasi mengenai kandungan zat BPA pada galon isi ulang yang diklaim berbahaya bagi bayi, balita dan ibu hamil.

Dilansir dari antaranews.co.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa galon isi ulang yang banyak digunakan masyarakat memang mengandung BPA. Walau demikian, kandungan BPA dalam kemasan isi ulang yang beredar itu telah memenuhi syarat ambang batas, yang berarti aman digunakan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru BPOM Ema Setyawati, mengatakan air minum dalam kemasan (AMDK) terdiri dari empat jenis, yaitu air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air embun. Keempat jenis AMDK tersebut harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, selama memenuhi syarat SNI tentu saja aman. Sesuai namanya air minum dalam kemasan, maka kemasannya pun harus aman.

2 [HOAKS] Peringatan Pemerintah Inggris Tentang Bahaya Penggunaan Vaksin COVID-19 Pfizer/Biontech

Telah beredar pesan berantai dalam Bahasa Inggris di WhatsApp yang berisi pesan berantai dari Pemerintah Inggris mengenai bahaya penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer/Biontech.

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim peringatan bahaya penggunaan vaksin Pfizer/Biontech dari Pemerintah Inggris adalah salah. Faktanya, Pemerintah Inggris hanya mengeluarkan informasi dan saran untuk penerima vaksin Pfizer/Biontech.

3 [HOAKS] Link Subsidi Kuota Belajar 75 GB Berlaku hingga 10 Januari 2021

Beredar di WhatsApp sebuah link terkait subsidi kuota belajar sebesar 75 GB. Disebutkan pula bahwa subsidi tersebut hanya berlaku hingga 10 Januari 2021.

Dikutip dari Medcom.id, klaim bahwa link itu terkait dengan subsidi kuota belajar sebesar 75 GB, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sempat memberikan subsidi kuota pada 2020 lalu. Namun hingga awal pekan Januari 2021, belum ada keputusan untuk pemberian subsidi kuota.



4 [HOAKS] Lowongan Kerja PT Astra dengan Gaji

Beredar sebuah postingan di WhatsApp Group berupa lowongan kerja di PT Astra (GROUP) dengan fasilitas gaji Rp 5,2 juta per bulan.

Faktanya, dikonfirmasi melalui Head of Investor Relations at PT Astra International Tbk, Tira Adianti memastikan kalau lowongan kerja itu tidak benar. "Tadi tim saya click link yang diberikan, sepertinya hoaks. Sebab, template-nya bukan standard Astra. Itu penipuan sudah terkonfirmasi ya," ujar Tira Adianti. Lebih lanjut, Employer Branding PT Astra International Tbk, Diah Wahyu Utami mengatakan, perusahaan tempatnya bekerja tidak pernah menyebutkan nominal gaji hingga tunjangan saat menyebarkan lowongan kerja. Dia memastikan, lowongan kerja yang tersebut di WhatsApp harus dicermati lebih baik.



5 [HOAKS] Penerima Vaksin Sinovac Pertama Meninggal Dunia

Beredar informasi yang berasal dari sebuah artikel berjudul "Penerima perdana suntikan vaksin COVID-19 sinovac cina, meninggal dunia". Pada artikel tersebut terdapat narasi yang berbunyi "Pekerja kesehatan dan sukarelawan Fabiana Souza menerima vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan China Sinovac Biotech di Rumah Sakit Sao Lucas, di Porto Alegre, Brasil selatan, meninggal dunia."

Dilansir dariMerdeka.com, informasi penerima pertama vaksin Sinovac meninggal dunia adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi tentang hal tersebut. Selain itu, klaim bahwa pekerja kesehatan dan sukarelawan Fabiana Souza yang menerima vaksin COVID-19 meninggal dunia juga tidak benar dan informasi terkait hal itu juga tidak ditemukan.

6

[HOAKS] Resep Campuran Teh Hijau dan Lemon untuk Atasi Covid-19

Beredar postingan yang menyatakan bahwa resep teh hijau dicampur dengan lemon dapat mengatasi COVID-19. Dalam narasi itu disebutkan pula bahwa resep tersebut merupakan resep rahasia dari Vietnam yang membuat negara itu mampu mengatasi COVID-19.

Faktanya, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa campuran teh hijau dengan lemon dapat mengatasi COVID-19. Dilansir dari Unair.ac.id, Ahli Gizi Stefania Widya Setyaningtyas S.Gz. M.PH., mengatakan bahwa lemon dapat mengubah pH tubuh sehingga virus tidak dapat bertahan merupakan hal yang tidak benar. Ia menyebut pH tubuh diatur oleh suatu mekanisme kompleks yang tidak akan berubah hanya karena mengonsumsi makanan. Terkait teh hijau yang juga dianggap dapat mencegah infeksi COVID-19, menurut Stefania hal itu belum sepenuhnya terbukti.



7

[DISINFORMASI] 2 Orang Tuna Wisma yang Ditemui Oleh Mensos Risma Saat Blusukan Hanya Settingan

Telah beredar di media sosial Twitter sebuah unggahan foto yang memperlihatkan 2 orang tuna wisma sedang makan di sebuah kantin. Unggahan tersebut mengklaim bahwa blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini hanya settingan atau sudah diatur untuk keperluan pencitraan.

Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa blusukan Mensos Risma hanya settingan adalah klaim yang salah. Kedua orang tuna wisma tersebut meminta kepada Risma agar dipulangkan ke daerah asalnya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Namun sebelum membelikan tiket, Risma mengajaknya ke Kantor Kementerian Sosial terlebih dahulu. Sebelum tiba di kantor Kementerian Sosial kedua orang tersebut diajak oleh Risma makan di sebuah kantin.



8 [HOAKS] BPOM Beri Izin Sebuah Produk Kosmetik Bisa Cegah dan Sembuhkan COVID-19

Beredar iklan sebuah produk kosmetik di Marketplace Facebook yang mengklaim bisa mencegah Virus Corona COVID-19 sudah bersertifikasi BPOM. Dalam postingan juga dijelaskan tatacara penggunaannya.

Dilansir dari Liputan6.com, klaim produk kosmetik yang bisa mencegah dan menyembuhkan COVID-19 telah mendapat izin BPOM adalah tidak benar. Faktanya hingga saat ini belum ada pencegah maupun obat khusus untuk penyakit tersebut dan BPOM tak memberikan izin produk tersebut sebagai pencegah dan penyembuh COVID-19.



9 [HOAKS] Tulisan Najwa Shihab Tentang COVID-19

Beredar informasi melalui media sosial Facebook dan broadcast WhatsApp yang berisi beberapa klaim terkait Virus Corona (COVID-19) yang mengatasmakan jurnalis dan presenter Najwa Shihab. Dalam informasi tersebut secara tersirat meragukan efektivitas rapid test yang selama ini diandalkan untuk mendeteksi pasien positif COVID-19.

Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Najwa Shihab melalui unggahan Instagram stories di laman Instagram resminya @najwashihab, pada 6 Januari 2021. Najwa menyebut bahwa informasi yang mengatasmakan dirinya tersebut adalah tidak benar. Ia menegaskan, dirinya tidak pernah membuat tulisan seperti pada unggahan yang beredar.

10

[HOAKS] Surabaya Kembali Zona Merah, RS Penuh dan Rencana Razia Masker

Kembali Zona Merah, RS Penuh dan Rencana Razia Masker

Telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi mengenai Surabaya kembali masuk zona merah. Disebutkan pula bahwa sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh pasien Corona dan pelanggaran razia masker akan didenda Rp 250 ribu.

Dilansir dari laman Suarasureabaya.net, Informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Faktanya, Surabaya saat ini termasuk zona kuning dan juga rumah sakit rujukan COVID-19 Surabaya tidak semuanya penuh. Adapun mengenai razia, Detikcom mengkonfirmasi broadcast tersebut kepada Kabagbinops Ditlantas Polda Jatim. Kopol Gathot Bowo. Gathot memastikan pesan berantai itu tidak benar.

KAMI SIAP DIVAKSIN



JOHNNY G. PLATE
MENTERI KOMINFO RI

**LINDUNGI DIRI,
LINDUNGI NEGERI**

TETAP TERAPKAN 3M

#Vaksindimulai #SukseskanVaksin

